



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELINDUNGAN ANAK

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak Tahun 2020-2022 perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Nomor 96 tahun 2021);
  9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);
  12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan ((Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Rencana Aksi Daerah Perwujudan Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan Daerah Layak Anak untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu 2023-2027.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Perwujudan Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Daerah Layak Anak.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah mewujudkan Daerah Layak Anak adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan arahan strategi dan program dalam mewujudkan Daerah Layak Anak;
  - b. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam mewujudkan Daerah Layak Anak;
  - c. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Daerah Layak Anak.

### Pasal 3

Rencana Aksi Daerah mewujudkan Daerah Layak Anak ini terdiri atas:

- a. Klaster kelembagaan dan
- b. Klaster Hak Anak yang terdiri dari:
  - 1) hak sipil dan kebebasan;
  - 2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - 3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - 4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  - 5) hak perlindungan khusus.

### Pasal 4

Rincian Rencana Aksi Daerah mewujudkan Daerah Layak Anak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

Pendanaan dalam mewujudkan Daerah Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 88 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PELINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027

Anak sebagai generasi penerus bangsa secara sosio kultural berada pada situasi rawan dari berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya. Sudah merupakan kebutuhan utama bagi anak untuk mendapat proteksi atau perlindungan dari berbagai pihak. Terutama agar dalam proses pertumbuhannya menjadi manusia dewasa yang tangguh, dan handal untuk menjadi komponen bangsa Indonesia dimasa depan.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Awal mula inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan oleh UNICEF yang merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai “*Children Perception of the Environment*” di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial, mempunyai aturan yang jelas dan tegas, memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan mereka. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dikembangkan berbagai indikator untuk mengukur suatu wilayah/kawasan yang ramah terhadap anak.

Di dalam sebuah negara anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara. Demi menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama yang menentukan maju dan mundurnya negara, oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh baik secara jasmani, rohani dan sosial, agar mereka dapat berkembang dengan sehat serta dalam keadaan bebas dan bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, keluarga (orang tua) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat bertanggung jawab menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya, serta Pemerintah, Lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat. Keberadaannya harus dilindungi, anak berhak untuk

hidup dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana bunyi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>4</sup> Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya

upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan Bangsa dan Negara.

Selain hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak. Jaminan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 tentang definisi Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena maraknya masalah hukum yang melibatkan seorang anak. Keterlibatan seorang anak dalam masalah hukum mampu menjadikan masyarakat tidak peka terhadap keadilan dan meremehkan peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian yang mendalam bagi orang tua dalam mendampingi dan mengawasi perilaku anak. Anak adalah seseorang yang belum matang baik secara mental maupun fisik, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, bahwa masih terdapat ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh dari angan-angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya.

Pelindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah DIY, yang masuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Upaya pelindungan anak yang dicanangkan sudah dituangkan secara

khusus dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan untuk dapat diimplementasikan secara baik, diperlukan adanya suatu Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan Anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Pelindungan Anak, melalui program yang saling terintegrasi dengan para Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan pelindungan anak secara terpadu.

Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah Banyaknya aturan hukum yang mengatur pelindungan hak-hak anak, banyaknya lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk pelindungan hak-hak anak, menunjukkan pelindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak. Tetapi gejala sosial masih menunjukkan pemenuhan hak-hak anak, belum terpenuhi baik itu dari lapisan masyarakat tidak saja dari keluarga miskin tapi juga dari keluarga kaya, walaupun dengan permasalahan yang berbeda.

Meskipun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya di DIY untuk menurunkan angka kekerasan, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang cepat dan membuat dunia tanpa batas ditambah dengan masih adanya ancaman pandemik covid-19, maka potensi ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi ditambah dengan belum terbangunnya sistem pencegahan yang komprehensif.

Faktor Penghambat capaian prevalensi kekerasan anak selama ini adalah:

- a. Dampak pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat mengalami berbagai permasalahan misalnya kebijakan *Work Form Home* (WFH), *School From Home* (SFH), berkurangnya penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja dll, sehingga menambah *stresor* yang bisa memicu munculnya perilaku kekerasan;
- b. Perkembangan teknologi informasi membuat dunia tanpa batas, potensi ancaman kekerasan semakin tinggi;
- c. Modus kekerasan mengalami berbagai perubahan yang sering kali sulit diantisipasi pencegahannya;
- d. Selain itu, terdapat sejumlah kasus pelanggaran hak anak yang tidak didata secara khusus, diantaranya *bullying* terhadap anak;
- e. Program yang berkaitan dengan anak di lembaga pemerintah tersebut juga belum seluruhnya terserap masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan dan perlindungan anak diserahkan kepada masing-masing daerah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota. Perlu digarisbawahi bahwa penyusunan rencana yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan perkembangan dan perlindungan anak dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggerakkan seluruh pihak yang terkait di lingkup pemerintah daerah, dan juga, program tersebut yang dijalankan oleh pemerintah, tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan dari elemen masyarakat, harus menjadi kesadaran Bersama bahwa ini merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat dan bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dan juga masyarakat.

Lingkungan yang terbaik untuk anak yaitu mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; memberi kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan; memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Untuk Kota Yogyakarta, kebijakan KLA diinisiasi pada tahun 2009. Dari tahun ke tahun, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari segi prestasi predikat KLA yaitu Madya pada tahun 2014. Pada tahun 2018-2019 Kota Yogyakarta memperoleh predikat Nindya. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak Kota Layak Anak (KLA) yang diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mampu menguatkan dan memudahkan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang ramah terhadap anak.

Pada saat ini Kota Yogyakarta kembali mendapatkan peningkatan predikat Kota Layak Anak (KLA) menjadi tingkat utama pada tahun 2022 dari Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Dengan predikat tersebut, Kota Yogyakarta kemudian diidentikkan dengan kota yang penuh dengan nuansa kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak.

Penyusunan indikator dalam Rencana Aksi Daerah Pelindungan Anak ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang hak anak dalam kerangka Konvensi Hak Anak yang merupakan kebijakan Kabupaten/Kota yang dikelompokkan dalam 5 kluster. Di samping itu dipandang perlu menambahkan satu kluster lagi, yaitu kelambagaan untuk melangkapi kluster-kluster yang sudah ada, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;

- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- e. Perlindungan Khusus;
- f. Kelembagaan.

Adapun selengkapnya klaster-klaster berikut rinciannya yang digunakan dalam RAD ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan
  - 1) Pemenuhan Hak Atas Identitas;
  - 2) Pemenuhan Hak Atas Pelindungan Identitas;
  - 3) Pemenuhan Hak untuk Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat;
  - 4) Pemenuhan Hak Berpikir, Berhati Nurani, dan Beragama;
  - 5) Pemenuhan Hak Berorganisasi Dan Berkumpul Secara Damai;
  - 6) Pemenuhan Hak Atas Pelindungan Kehidupan Pribadi;
  - 7) Pemenuhan Hak Atas Informasi Yang Layak;
  - 8) Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- b. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - 1) Kesehatan ibu dan anak
  - 2) Kesejahteraan
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 

Optimalisasi kualitas dan penambahan jumlah Lembaga Pengasuhan Anak.
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
  - 1) Pendidikan;
  - 2) Waktu Luang;
  - 3) Kegiatan Budaya.
- e. Perlindungan Khusus
  - 1) Anak dalam situasi eksploitasi (Pelindungan anak dari Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi Ekonomi, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)
    - a) Anak yang mengalami kekerasan
    - b) Kekerasan seksual pada anak
  - 2) Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani:
    - a) Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
    - b) Anak penyandang disabilitas;
    - c) Anak jalanan;

- d) Anak terlantar;
  - e) Anak minoritas dan terisolasi.
- 3) Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.
- a) Anak berhadapan Hukum
  - b) Anak korban /terlibat jaringan terorisme
  - c) Anak yang mengalami perundungan

f. Kelembagaan

- 1) Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 2) Pelembagaan Kota/Kabupaten Layak Anak;
- 3) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan;
- 4) Hak dan Pelindungan Khusus Anak.

## Rencana Aksi Daerah

### 1. Hak Sipil dan Kebebasan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>A. Pemenuhan Hak Atas Identitas</b>											
Belum optimalnya cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak	1. Optimalisasi pemberian Akta Kelahiran di 5 kabupaten/kota di DIY untuk pencapaian target 100% dan Kartu identitas anak. (Pergub DIY No. 56 tahun 2017).	Pendataan kependudukan dan pencatatan sipil	100% anak di DIY memiliki Kutipan Akta kelahiran	98,31%	98,50%	99%	99,50%	99,80%	100%	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
			100% Anak di DIY memiliki kartu identitas anak (KIA)	76,79%	83,04%	89,29%	94,54%	98,80%	100%		
	2. Memastikan layanan administratif diberikan secara gratis dan dapat diakses oleh semua orang, khususnya masyarakat terpencil & rentan.	Program layanan kependudukan gratis bagi Anak-anak keluarga miskin dan rentan.	Pelayanan Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Biro Tata Pemerintahan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Program kolaborasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk penjangkauan masyarakat terpencil dan rentan.	Adanya dukungan penerbitan dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Biro Tata Pemerintahan	DP3AP2, KPAID
			Jumlah Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	0	5 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga	Biro Tata Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, DP3AP2, KPAID
		Memadukan layanan administratif ke dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan ibu hamil.	Adanya sistem administrasi terpadu bagi ibu hamil dengan sistem administrasi kelahiran tingkat kalurahan.	Ada	Ada terlaksana	Biro Tata Pemerintahan	DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial				
		Sosialisasi dan promosikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya registrasi kelahiran kepada masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam proses-proses inisiatif	Jumlah sosialisasi kepada orangtua terkait registrasi kelahiran	0	10	20	30	40	50	Biro Tata Pemerintahan	DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kanwil Kemenag, BKKBN

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>B. Pemenuhan Hak Atas Pelindungan Identitas</b>											
Belum optimalnya pemenuhan hak anak atas pelindungan identitas. Beberapa kasus manipulasi umur, dan identitas anak menjadi persoalan tersendiri. Selain itu sangat mudahnya orang tua/orang dewasa lainnya yang mengekspose anak-anak di sosial media	1. Memastikan tidak adanya manipulasi usia anak khususnya kelompok rentan administrasi kependudukan	Pendataan kependudukan	0 kasus manipulasi Umur	0	0	0	0	0	0	Biro Tata Pemerintahan	DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
	2. Menjadikan pencatatan kelahiran sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam program pelindungan sosial.	Koordinasi lintas OPD	Adanya sistem terpadu	-	Ada dan terlaksana	Biro Tata Pemerintahan	DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial				
	3. Menyusun protokol etik penyebaran informasi anak (tulisan, foto, video, dan dokumen lainnya) untuk menjaga privasi dan Pelindungan identitas anak	Kajian penyusunan protocol etik informasi Anak.	Adanya protokol etik penyebaran informasi tentang anak.	0	0	0	1 Modul	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Pembelajaran Keluarga, DP3AP2, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, KPID

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>C. Pemenuhan Hak untuk Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat</b>											
Belum memadainya ruang public ( <i>Public space</i> dan <i>Publik Spare</i> ) bagi anak untuk mengekspresikan ide dan bakatnya sesuai dengan tahap perkembangannya.	1. Optimalisasi penyediaan sarana-prasarana ruang bermain sebagai sarana aktualisasi diri dan penyaluran energi, ekspresi, minat, bakat, melalui kegiatan olahraga, bermain, dan ruang interaksi sosial bagi anak, sehingga lingkungan itu kondusif bagi tumbuh kembang anak di DIY.	Penambahan sarana-prasarana ruang bermain anak	Penyediaan sarana-prasarana sesuai dengan kebutuhan anak/remaja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUP-ESDM	DP3AP2, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Forum Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
			Forum anak yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana-prasarana, ruang bermain anak/Remaja	-	2% Forum Anak	4% Forum Anak	6% Forum Anak	8% Forum Anak	10% Forum Anak	DP3AP2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Forum Anak, LSM

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
			Tersedia ruang interaksi sosial yang aman untuk anak-anak di DIY	-	5 titik	10 titik	15 titik	20 titik	25 titik	Dinas PUP-ESDM	DP3AP2, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Paniradyo, BAPPEDA, Forum Anak, LSM
	2. Menjamin partisipasi anak dalam situasi-situasi rentan, khususnya anak dengan disabilitas dan anak yang berasal dari agama atau suku minoritas, dalam berbagai forum anak.	Pengorganisasian anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak yang termarginalkan lainnya dalam forum anak.	Jumlah anak dengan disabilitas dan anak termarginalkan terlibat dalam penyusunan forum anak.	-	10	20	30	40	50	DP3AP2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Forum Anak, LSM

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	3. Mengaktifkan kampung dolanan anak dalam ruang lingkup desa mandiri budaya	Fasilitasi kampung dolanan anak di lingkup Desa Mandiri Budaya.	Bertambahnya kampung dolanan anak dalam ruang lingkup desa mandiri budaya di DIY	10 DMB	15 DMB	20 DMB	25 DMB	30 DMB	35 DMB	Dinas Kebudayaan	Paniradya Kaistimewan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, DP3AP2, Forum Anak, LSM, Kelurahan/ Kalurahan
Nilai-Nilai Budaya keyogyakarta belum menjadi bagian integral dalam proses Pendidikan di DIY.	1. Pentingnya optimalisasi pengarusutamaan pendidikan sekolah berbasis budaya (olah pikir, olah rasa, olah raga) di SMA/ sederajat, di kabupaten/kota di Yogyakarta -	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pendidikan khas Kejojokartaan	Ada kajian <i>Grand Design</i> Sekolah Khas Kejojokartaan	0	0	0	1 Kajian	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Dewan Kebudayaan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kanwil Kemenag DIY
			Adanya modul dan silabus pendidikan muatan lokal	-	0	0	1 Modul	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Dewan Kebudayaan, MGMP, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP/ Balai Tekkomdik)

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Produksi audiobook dan audio-visual yang berisi tentang Handbook “Nilai-nilai Budi Pekerti Luhur” untuk siswa berkebutuhan khusus	Adanya audiobook dan audio visual handbook nilai-nilai budi pekerti luhur	-	0	0	0	1 audiobook dan audio visual	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Dewan Kebudayaan, MGMP, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP/Balai Tekkomdik)
	2. Pentingnya evaluasi program sekolah sejahtera	Kajian Evaluasi Program Sekolah Sejahtera	Adanya dokumen evaluasi program		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	DP3AP2, Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan, Biro Bina Mental dan Spiritual
Masih adanya diskriminasi atas dalam praktik-praktik Pendidikan yang berkait dengan isu agama.	3. Pentingnya optimalisasi pendidikan keagamaan di sekolah yang lebih bersifat kontekstual yang memadukan praktik kesalehan ritual dan praktik kesalehan sosial.	Menyusun Grand Desain dan kurikulum Pendidikan keagamaan yang kontekstual.	Adanya desain program pendidikan keagamaan yang bersifat kontekstual yang memadukan kesalehan ritual dan kesalehan sosial	0	0	0	1	0	0	Kanwil Kementerian Agama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, NU, Muhammadiyah, Perguruan Tinggi, Biro Bina Mental dan Spiritual

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		<i>Workshop</i> dan koordinasi implementasi Pendidikan keagamaan yang kontekstual	Jumlah <i>workshop</i> Pendidikan keagamaan yang kontekstual	0	0	0	0	10	10	Kanwil Kementerian Agama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, NU, Muhammadiyah, Perguruan Tinggi
		Pesantren Ramah anak	Sosialisasi hak-hak anak dan perlindungan anak di pesantren Percontohan pesantren ramah anak	0	0	0	0	10	10	Kanwil Kementerian Agama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, NU, Muhammadiyah, Perguruan Tinggi
<b>D. Pemenuhan Hak Berorganisasi Dan Berkumpul Secara Damai.</b>											
Belum optimalnya kelembagaan partisipasi anak	1. Meningkatkan jumlah forum anak dan penguatan kualitas forum anak di DIY di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kalurahan.	Advokasi pembentukan forum anak daerah	Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk di Kalurahan / Kelurahan	-	2%	4%	6%	8%	10%	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID)
		Fasilitasi forum anak	Persentase Jumlah forum anak yang difasilitasi	-	2%	4%	6%	8%	10%	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID
	2. Peningkatan dukungan eksternal dari para mitra untuk memfasilitasi organisasi dan kegiatan Bersama anak-anak di Kabupaten/Kota di Yogyakarta.	Program kolaborasi kaprajan (pemerintah)-komunitas (NGO, Donor)-Kampus	Jumlah mitra yang berkolaborasi dalam memfasilitasi organisasi dan kegiatan Bersama anak.	-	5 NGO/kampus	10 NGO/kampus	15 NGO/kampus	20 NGO/kampus	25 NGO/kampus	BAPPEDA	DP3AP2, Biro Tata Pemerintahan KPAID, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Koordinasi Forum Anak Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Jumlah Forum Anak Daerah yang dilibatkan dalam Musrembang dan pengambilan kebijakan terkait anak	--	2%	4%	6%	8%	10%	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Forum Anak, KPAID, NGO
	2. Penyelenggaraan pendidikan alternatif yang kreatif dan rekreatif bagi anak-anak milenial di sekolah di DIY melalui pengarusutamaan Pramuka, PMR, Kesenian, Olahraga, dll.	Fasilitasi kegiatan-kegiatan organisasi sekolah di tingkat SMP/SMA.	Bertambahnya <i>life skill education</i> di tingkat kabupaten/Kota di DIY	--	5 paket	10 paket	15 paket	20 paket	25 paket	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Dinas Komunikasi dan Informatika, Institusi Sekolah
	4. Revitalisasi terkait FPKK dan Forum Anak dan Pusat Pembelajaran Keluarga (ada beberapa wilayah yang belum mempunyai Pusat Pembelajaran Keluarga, agar didorong lagi untuk mempunyai Pusat Pembelajaran Keluarga dan Forum Anak)	Pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga di DIY	Jumlah percontohan Pusat Pembelajaran Keluarga	-	2	3	5	5	5	DP3AP2	Pusat Pembelajaran Keluarga, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kebudayaan, Dewan Kebudayaan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>E. Pemenuhan Hak Atas Pelindungan Kehidupan Pribadi</b>											
Belum optimalnya program ketahanan keluarga di DIY.	1. Pentingnya peningkatan proaktifnya kalurahan untuk menyusun Peraturan Kelurahan/ Kalurahan ketahanan keluarga untuk memperkuat kontrol orang tua terhadap anak yang berpotensi menjadi ABH	Implementasi Ketahanan keluarga di tingkat kelurahan/kalurahan di DIY	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Kelurahan/ Kalurahan ketahanan keluarga di DIY	-	2%	4%	6%	8%	10%	DP3AP2	Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Biro Bina Mental Spiritual, Kelurahan, NGO
	2. Meningkatkan "lembaga penitipan dan pengasuhan anak berbasis komunitas" di DIY, yang ada adalah lembaga penitipan anak yang bersifat komersial.	Fasilitasi lembaga penitipan dan pengasuhan anak berbasis komunitas di DIY.	Meningkatnya jumlah dan kualitas "lembaga penitipan dan pengasuhan anak berbasis komunitas" yang berbasis tata nilai Budaya Yogyakarta. (LKSA)	-	2%	4%	6%	8%	10%	DP3AP2	Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Biro Bina Mental Spiritual, Kelurahan/ Kelurahan, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>F. Pemenuhan Hak Atas Informasi Yang Layak</b>											
Belum optimalnya penyediaan fasilitas informasi layak anak	1. Penyediaan fasilitas informasi layak anak	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan standarisasi di masing-masing kab./kota	Jumlah PISA terstandarisasi di masing-masing Kabupaten/Kota	-	5	10	15	20	25	DP3AP2	KPAID, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informasi, BPAD
		Pembinaan dan pelatihan SDM penyelenggara	Jumlah SDM penyelenggara PISA yang dilatih	-	5	10	15	20	25	DP3AP2	KPAID, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informasi, BPAD
		PISA di masing-masing kabupaten/kota									
	2. Meningkatkan layanan telepon sahabat anak (TESA) di kabupaten kota di DIY	Layanan telepon sahabat anak (TESA)	Persentase Jumlah anak yang terlayani	328	5%	10%	15%	20%	25%	DP3AP2	Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatkan jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang	Fasilitasi sarana dan prasarana perpustakaan ramah anak.	Bertambah jumlah pojok baca/ perpustakaan ramah anak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Perpustakaan dan Arsip	DP3AP2, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID	
4. Mengatasi penyebaran informasi yang tidak akurat, menyangkal mitos, dan melawan stigma.	Pembentukan dan kolaborasi menangkal hoaks informasi anak.	Adanya tim anti Hoaks terkait isu anak di DIY	-	1/ Kabupaten/Kota	1/ Kabupaten/Kota	1/ Kabupaten/Kota	1/ Kabupaten/Kota	1/ Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	DP3AP2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dewan Pendidikan, KPAID, Dewan Riset, CSR, NGO	

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Masih minimnya ruang publik ( <i>publis space</i> dan <i>public spare</i> ) bagi anak.	5. Optimalisasi penyediaan ruang bermain ( <i>playground</i> ) yang memadai sebagai sarana penyaluran energi melalui olahraga, bermain, dan ruang interaksi sosial bagi siswa yang memadai bagi siswa di sekolah	Fasilitasi sarana dan prasarana ruang bermain anak.	Taman bermain anak di Kabupaten/kota	90 titik	100titik	110 titik	115 titik	120 titik	125 titik	Dinas PUP-ESDM	DP3AP2, Biro Pemberdayaan masyarakat, Biro Bina Mental Spiritual, Dinas Kebudayaan, Dinas pariwisata, KPAID, Forum Anak, Kelurahan/ Kalurahan, NGO, CSR
Pendidikan berbasis <i>Life skill</i> masih kurang.	6. Menyelenggarakan LSE ( <i>life Skill Education</i> ) dan konseling berbasis sekolah untuk remaja di kabupaten/kota di DIY.	Program layanan konseling untuk anak.	Jumlah lembaga yang menyediakan konseling anak di tingkat Kelurahan/ Kalurahan	70	80	90	100	110	120	DP3AP2	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (RDU), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) DIY, Dewan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Perguruan Tinggi, NGO, Kelurahan/ Kalurahan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			Persentase Jumlah anak yang mengakses layanan konseling.	-	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	DP3AP2	RDU, HIMPSI DIY, Biro Bina Mental Spiritual, Dewan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Perguruan Tinggi, NGO, Kelurahan/ Kalurahan
<b>G. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.</b>											
Belum optimalnya program ketahanan keluarga di DIY.	1. Optimalisasi penyusunan pedoman dan diseminasi pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan anak-anak berbasis budaya/tradisi luhur di lingkup keluarga di DIY	Penyusunan Grand Design Pendidikan orang tua (Orang Dewasa)	Adanya grand design Pendidikan orang tua (orang dewasa) di DIY	-					1 Dokumen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Dewan Pendidikan, , Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan
	2. Optimalisasi program pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan anak-anak berbasis	Piloting Sekolah/Pendidikan orang tua (orang Dewasa) di Kabupaten/ Kota di DIY	Jumlah sekolah/ pendidikan Orang tua (orang dewasa)	-	5 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	20 sekolah	25 sekolah	Dinas Pendidikan dan olahraga	DP3AP2 Dewan Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Pusat Pembelajaran

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	budaya/tradisi luhur di lingkup keluarga di DIY										Keluarga NGO, CSR
		Pelatihan digital Parenting	Jumlah orang tua yang mengikuti pelatihan	-	250 Orang tua	500 Orang tua	750 Orang tua	1000 Orang tua	1250 Orang tua	DP3AP2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dewan Pendidikan, Dinas kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Pusat Pembelajaran Keluarga NGO, CSR

## 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
Belum semua LKSA/ Lembaga Pengasuhan Terstandarisasi dan terakreditasi; Standar nasional pengasuhan anak; Permensos 30/2011	1. Mendorong LKSA/LPA untuk melakukan akreditasi dan memiliki child safe guarding	Optimalisasi kualitas dan penambahan jumlah Lembaga Pengasuhan Anak	Jumlah lembaga pengasuhan anak yang terakreditasi		50%	60%	75%	85%	100%	Dinas Sosial	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, DP3AP2, KPAI, Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Pusat Pembelajaran Keluarga
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Ruang Bermain Ramah Anak	2. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Ruang Bermain Ramah Anak yang berperspektif kebencanaan	Optimalisasi kualitas dan penambahan jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun		50%	60%	75%	85%	100%	Dinas PU dan ESDM	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, DP3AP2, KPAI, Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas PUP-ESDM
Belum terprioritaskannya program pengasuhan berkelanjutan bagi keluarga dan orang tua yang membutuhkan	3. Memprioritaskan program pengasuhan berkelanjutan bagi keluarga dan orang tua yang membutuhkan	Prioritas program pengasuhan berkelanjutan bagi keluarga dan orang tua yang membutuhkan	Tersedia, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga		50%	60%	75%	85%	100%	DP3AP2	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, KPAI, Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Dinas Sosial, Pusat Pembelajaran Keluarga

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Masih relatif banyaknya kejadian kekerasan fisik, emosional, seksual, dan kekerasan pada anak	4. Pencegahan kejadian kekerasan fisik, emosional, seksual, dan kekerasan pada anak	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kejadian kekerasan fisik, emosional, seksual dan kekerasan ekonomi pada anak	Persentase optimalisasi pencegahan dan penanganan kejadian kekerasan fisik, emosional seksual dan kekerasan ekonomi pada anak		50%	65%	85%	90%	100%	DP3AP	Pemerintah DIY, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial,
Belum terintegrasikan secara sosial sosial dalam pengasuhan alternatif melibatkan orang tua, masyarakat, lembaga masyarakat, dan dunia usaha	5. Reintegrasi sosial dalam pengasuhan alternatif melibatkan orang tua, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan dunia usaha	Pelibatan seluruh <i>stakeholder</i> baik OPD maupun swasta yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif	Persentase Jumlah pihak yang terlibat		50%	65%	85%	90%	100%	DP3AP2	Pengawas sekolah/ madrasah, pihak sekolah, Komisi Pencegahan HIV AIDS, Pesantren UPT PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga, Mitra keluarga, PKK, Dunia usaha, PATBM

### 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
<b>A. Kesehatan ibu dan anak</b>											
Standar kesehatan ibu dan anak pada fase kehamilan, melahirkan, dan nifas	1. Pelayanan kesehatan terstandar pada masa kehamilan, nifas dan bayi baru lahir	100% layanan kesehatan memprioritaskan kesehatan ibu dan anak dalam fase kehamilan, melahirkan dan nifas	a. Persentase persalinan di fasyankes b. Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL c. Persentase anak usia 18-24 bulan mendapat booster campak rubella	-	a. 97% b.95% c. 95%	a. 97,5% b.95% c 95%	a. 98% b.95% c 95%	a. 98,5% b.95% c 95%	a. 98,5% b.95% c. 95%	Dinas Kesehatan	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Kalurahan, Keluarga, Gerakan Masyarakat, meluas ke RT/RW ke Kelurahan/ Kalurahan – dalam wujud “KELURAHAN / KALURAHAN LAYAK ANAK” dan Kemantren/Kapanewon Layak Anak, DP3AP2, Dinas Kesehatan, Puskesmas, TP PKK, Posyandu
Masih adanya kasus ibu hamil anemia dan KEK	2. Upaya perbaikan status gizi ibu hamil	Perbaikan status gizi ibu hamil melalui berbagai pihak terkait	Fasilitas kesehatan, posyandu, penyuluh kesehatan	Persentase ibu hamil yang kek	12,0%	11,8%	11,6%	11,4%	11,2%	Dinas Kesehatan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, Puskesmas, TP PKK, Posyandu

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
Belum optimalnya capaian ASI eksklusif	3. Optimalisasi capaian ASI eksklusif	Kampanye dan dukungan terhadap pencapaian ASI eksklusif	Fasilitas kesehatan, posyandu, posbindu, penyuluh kesehatan		91%	92%	93%	94%	94%	Dinas Kesehatan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Puskesmas, TP PKK, Posyandu, industri makanan, UMKM
Belum terpadunya layanan administratif ke dalam penyediaan layanan dasar bagi ibu hamil dan menyusui.	4. Memadukan layanan administratif ke dalam penyediaan layanan dasar bagi ibu hamil dan menyusui.	Integrasi layanan administrasi untuk kebutuhan dasar bagi ibu hamil dan menyusui	Meningkat setiap tahun		100%	100%	100%	100%	100%	Biro Tata Pemerintahan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kesehatan, Biro Tata Pemerintahan, Puskesmas, TP PKK, Posyandu
Masih adanya kasus kematian ibu dan anak karena faktor gizi	5. Penurunan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan gizi melalui diversifikasi dan ketahanan pangan	Program peningkatan gizi melalui diversifikasi dan ketahanan pangan	Tingkat ketersediaan energi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Dengan satuan kkal/kap / hari	3,735	3,736	3,737	3,738	3,739	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			Pola Pangan Harapan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Persentase PPH - AKG	94,4%	94,5%	94,6%	94,7%	94,8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan
			Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Dengan satuan kkal/kap / hari	2,145	2,143	2,141	2,139	2,137	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan
Masih adanya kasus bayi <i>stunting</i> .	6. Pengurangan seoptimal mungkin bagi balita dalam kondisi <i>stunting</i> .	Prioritas upaya penurunan prevalensi <i>stunting</i> bagi bayi dan balita di DIY	Penurunan presentasi <i>stunting</i> pada balita		17%	14%	14%	13,3%	13%	Dinas Kesehatan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Puskesmas, TP PKK, Posyandu
Perlu diawasnya keamanan pangan di DIY	7. Penurunan angka kematian Ibu dan anak serta Peningkatan Gizi melalui Pengawasan Keamanan pangan	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan 5 sertifikat per tahun	Sertifikasi keamanan pangan segar	Sertifikasi minimal 5 per tahun	5	10	15	20	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan
Minimnya kawasan ramah anak tanpa asap rokok dan iklan promosi serta sponsor rokok	8. Menyediakan kawasan ramah anak tanpa asap rokok dan iklan promosi serta sponsor rokok	Terciptanya kawasan ramah anak tanpa asap rokok dan iklan serta sponsor rokok	Persentase tersedia, dan meningkat setiap tahun		70%	75%	80%	90%	100%	Dinas Kesehatan	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Belum adanya jaminan penuh atas akses air bersih, air minum, dan sanitasi yang layak untuk mendukung kesehatan dasar ibu dan anak	9. Menjamin akses air bersih, air minum, dan sanitasi yang layak untuk mendukung kesehatan dasar ibu dan anak	Jaminan 100% akses air bersih, air minum dan sanitasi yang layak untuk ibu dan anak di DIY	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun		50%	65%	75%	90%	100%	Dinas PU dan ESDM	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas PUP-ESDM, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional DIY, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak, Perusahaan Daerah Air Minum, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Minimnya pengetahuan dan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja	10. Pengetahuan dan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja	Aksesibilitas kampanye kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, meningkat setiap tahun		100%	100%	100%	100%	100%	BKKBN	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna
Kurangnya sosialisasi dampak perkawinan anak di bawah umur	11. Sosialisasi dampak perkawinan anak di bawah umur	Kampanye tentang dampak negatif perkawinan anak/di bawah umur. Bertujuan untuk mengurangi jumlah anak kawin di bawah umur.	Pengurangan jumlah anak kawin di bawah umur	Persentase penurunan pernikahan di bawah umur	20%	30%	40%	50%	60%	BKKBN	Kanwil Kementerian Agama DIY, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, TP PKK, Karang Taruna

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Minimnya ketersediaan dan kemudahan akses bangsal medis untuk anak dengan HIV/AIDS yang memerlukan perawatan	12. Penyediaan dan akses terhadap penyediaan dan akses terhadap bangsal medis untuk anak HIV/AIDS	Menjamin ketersediaan dan akses bangsal medis khusus untuk anak yang menderita HIV/AIDS dan memerlukan perawatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan bangsal medis untuk anak HIV/AIDS		45%	50%	60%	80%	100%	Dinas Kesehatan	Komisi Pencegahan HIV/AIDS Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Negeri dan Swasta, DP3AP2, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
<b>B. Kesejahteraan</b>											
Belum optimalnya jaminan kebutuhan kesejahteraan dan hak-hak dasar pada anak	Menjamin kebutuhan kesejahteraan dan hak-hak dasar pada anak	Jaminan kebutuhan kesejahteraan dan hak-hak dasar pada anak	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun		45%	50%	60%	80%	100%	DP3AP2	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, KPAL, Pusat Pembelajaran Keluarga

#### 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
<b>a. Pendidikan</b>											
Belum maksimalnya pemerataan dan perluasan akses dan ketersediaan pendidikan di seluruh jenjang	1. Pemerataan dan perluasan akses dan ketersediaan pendidikan di seluruh jenjang	Terciptanya akses dan ketersediaan ekosistem pendidikan seluas mungkin bagi masyarakat DIY			100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, Dewan Pendidikan, Institusi Pendidikan,
Belum maksimalnya peningkatan APK, APM, APS di seluruh jenjang pendidikan di DIY	2. Peningkatan APK, APM, APS di seluruh jenjang pendidikan di DIY	Peningkatan APK, APM, APS di seluruh jenjang pendidikan di DIY	APK, APM, dan APS di seluruh jenjang pendidikan di DIY	Target tahunan persentase minimal per tahun untuk masing-masing jenjang	80%	85%	90%	95%	97%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, Dewan Pendidikan, Institusi Pendidikan,
Belum optimalnya sarana-prasarana perjalanan anak dari rumah ke sekolah/madrasah dan sebaliknya.	3. Sarana-prasarana perjalanan anak dari rumah ke sekolah/madrasah dan sebaliknya.	Penyediaan secara berjenjang dan berkelanjutan sarana prasarana perjalanan anak dari rumah ke sekolah/madrasah dan sebaliknya	Ada rute aman dan selamat ke/dari sekolah/madrasah (RASS), dan meningkat setiap tahun		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Perhubungan	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dewan Pendidikan, Institusi pendidikan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Belum optimalnya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI)	4. Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI)	Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI)	Ada PAUD-HI, dan meningkat tiap tahun Minimal 1 kalurahan /kelurahan 1 Pendidikan Anak (PAUD) Angka partisipasi PAUD di atas rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, Dewan Pendidikan, Institusi pendidikan,
Belum optimalnya SDM perlindungan anak bagi TK/PAUD HI	5. Optimalisasi SDM perlindungan anak bagi TK/PAUD HI	Pelatihan SDM perlindungan anak bagi TK/PAUD HI	TK/PAUD HI di DIY	0	1	1	1	1	1	DP3AP2	RDU, Taman Kanak-kanak Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (TK PAUD HI) se DIY
Di DIY belum semua anak mendapatkan hak untuk belajar agama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya anak dari kalangan penghayat, anak disabilitas.	6. Sekolah/ madrasah ramah anak dan inklusi DIY	Terciptanya sekolah/ madrasah ramah anak dan inklusif di DIY	Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan, Dewan Kelurahan/ Kalurahan, Institusi Pendidikan,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
Belum optimalnya program wajib belajar 12-14 tahun	7. Program wajib belajar 12-14 tahun	Optimalisasi program wajib belajar 12-14 tahun			100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dewan Pendidikan, Institusi Pendidikan
Belum adanya standarisasi dan pengawasan terhadap Pesantren Ramah Anak (PRA)	8. Program inisiatif dan pengawasan Pesantren Ramah Anak	Terciptanya pesantren-pesantren ramah anak di DIY	Minimal 1 pesantren ramah anak di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun		60%	75%	85%	90%	100%	Kanwil Kementerian Agama DIY	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Pondok Pesantren, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dewan Pendidikan, Institusi Pendidikan
Belum adanya pengarusutamaan pendidikan yang berlandaskan falsafah dan nilai-nilai khas Keyogyakarta	9. Pendidikan yang berlandaskan falsafah dan nilai-nilai khas Keyogyakarta	Terciptanya ekosistem pendidikan di DIY yang berlandaskan falsafah dan nilai-nilai kekhasan Keyogyakarta	Tersedia Ruang Kreatifitas Anak, dan dapat diakses/dimanfaatkan oleh semua anak		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Pemerintah DIY, Paniradya Kaistimewan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kebudayaan, Dewan Pendidikan, Institusi Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama DIY

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>b. Waktu Luang</b>											
Belum optimalnya hak bermain dan mengoptimalkan waktu luang pada hal positif	1. Hak bermain dan mengoptimalkan waktu luang pada hal positif	Optimalisasi hak bermain dan pemanfaatan waktu luang yang positif pada anak	Tersedia Ruang Kreatifitas Anak, dan dapat diakses/dimanfaatkan oleh semua anak		60%	75%	85%	90%	100%	DP3AP2	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, KPAl, Biro Bina Pembedayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas PUP-ESDM, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Belum maksimalnya kanalisasi hal positif untuk memanfaatkan waktu luang anak melibatkan berbagai stakeholder di DIY	2. Kanalisasi hal positif untuk memanfaatkan waktu luang anak melibatkan berbagai stakeholder di DIY	Terciptanya ruang-ruang dan program-program positif melibatkan berbagai elemen masyarakat di DIY			60%	75%	85%	90%	100%	DP3AP2	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, KPAl, Biro Bina Pembedayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas PUP-ESDM, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kurangnya ruang publik berupa RTH (ruang terbuka hijau) yang memberikan udara bersih, lingkungan sehat dan	3. Penambahan ruang publik berupa RTH (ruang terbuka hijau) yang memberikan udara bersih, lingkungan sehat dan	Penambahan Penambahan ruang publik berupa RTH (ruang terbuka hijau) yang memberikan udara bersih, lingkungan sehat dan	Jumlah RTH ramah anak		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DP3AP2, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Pengawas

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
sarana interaksi sosial yang kondusif, termasuk di dalamnya fasilitas bermain yang aman dan menunjang tumbuh kembang motorik anak	sarana interaksi sosial yang kondusif, termasuk di dalamnya fasilitas bermain yang aman dan menunjang tumbuh kembang motorik anak	sarana interaksi sosial yang kondusif, termasuk di dalamnya fasilitas bermain yang aman dan menunjang tumbuh kembang motorik anak									sekolah/madrasah, pihak sekolah, Togamas, Komisi Pencegahan HIV AIDS, pesantren UPT PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga, Mitra Keluarga, PKK, Dunia Usaha, PATBM
Belum maksimalnya layanan perpustakaan, sesuai dengan umur tumbuh kembang anak	4. Layanan perpustakaan, sesuai dengan umur tumbuh kembang anak	Meningkatkan konten perpustakaan di institusi pendidikan dan non pendidikan untuk menyediakan layanan sesuai umur tumbuh kembang anak	Jumlah perpustakaan yang terlibat dalam program		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)	Perpustakaan, taman bacaan, toko buku, pihak instansi terkait lain
Kurang optimalnya jumlah dan kinerja formasi pekerja sosial di tingkat SMP/SMA/MTs/MA, untuk mengatasi kasus di luar sekolah/madrasah yang tupoksinya tidak terjangkau guru BP/BK	5. Penambahan dan optimalisasi formasi pekerja sosial di SMP/SMA/MTs/MA	Mengatasi tantangan tupoksi guru BP/BK yang hanya di sekolah/madrasah melalui Pekerja sosial yang mampu menjangkau ke kegiatan di luar sekolah	Jumlah pekerja sosial yang menjangkau perbandingan yang sepadan		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Sosial	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, DP3AP2

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator / Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
					2023	2024	2025	2026	2027		
Peningkatan ketersediaan dan pemudahan akses layanan <i>foster care service</i> (pengasuhan sementara di luar keluarga inti)	6. Peningkatan jumlah dan kemudahan akses terhadap layanan <i>foster care service</i> (pengasuhan sementara di luar keluarga inti)	fostercare diharapkan mampu mengurangi anak terlantar, baiknya di keluarga bukan di panti atau LKSA	Jumlah foster care yang mencukupi untuk provinsi DIY		60%	75%	85%	90%	100%	Dinas Sosial	Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan
c. Kegiatan Budaya											
Belum maksimalnya jumlah taman atau ruang bermain dengan mengusung nilai budaya tradisi Keyogyakarta	1. Peningkatan jumlah taman atau ruang bermain dengan mengusung nilai budaya tradisi Keyogyakarta	Bertambahnya secara kualitas dan kuantitas jumlah taman atau ruang bermain dengan nilai budaya tradisi Keyogyakarta	Jumlah ruang bermain yang mengusung budaya tradisi keyogyakarta		5	10	15	20	25	Paniradya Kaistimewan	Pemerintah DIY, Paniradya Kaistimewan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/Kalurahan, Dinas Kebudayaan, DP3AP2, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PUP-ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dunia usaha

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Perlu ditingkatkan nya kegiatan budaya (musik, dolanan, dan kegiatan budaya lain) yang mendorong nuansa positif dengan langgam keyogyakarta-an	2. Reproduksi kegiatan budaya (musik, dolanan, dan kegiatan budaya lain) yang mendorong nuansa positif dengan langgam keyogyakarta-an	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan budaya (musik, dolanan, dan kegiatan budaya lain) yang mendorong nuansa positif dengan langgam keyogyakarta-an	Jumlah kegiatan event tahunan yang mendukung reproduksi kegiatan budaya dengan langgam keyogyakarta-an		20	25	30	45	50	Paniradya Kaistimewan	Pemerintah DIY, Paniradya Kaistimewan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Kalurahan, Dinas Kebudayaan, DP3AP2, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PUP-ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dunia usaha

## 5. Pelindungan Khusus

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran/ kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat	
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027			
A. Anak dalam situasi eksploitasi (Pelindungan anak dari Kekerasan Terhadap anak (KTA) (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)												
A.1. Anak yang mengalami Kekerasan												
Belum optimalnya pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	1. Optimalisasi pelayanan anak yang memerlukan pelindungan khusus	Fasilitasi anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi	100% anak yang memerlukan pelindungan khusus (AMPK) terlayani	478 kasus	431	384	337	290	243	DP3AP2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), HIMPSI DIY, KPAI, RDU	
		Penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap anak	414	373	332	291	250	209	DP3AP2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), POLDA, Dinas Sosial	
		Pembuatan kode etik penyelenggaraan pelindungan anak	Jumlah kabupaten/kota yang telah menerbitkan kode etik penyelenggaraan pelindungan anak	-	5 Kabupaten/Kota	DP3AP2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian Daerah (Polda), Dinas Sosial					
		Pendampingan dan sosialisasi penggunaan internet aman untuk anak	Jumlah kabupaten/kota yang terlatih dalam penggunaan internet aman untuk anak	-	5 Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	DP3AP2, KPAI, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pusat Pembelajaran Keluarga					
		Pendampingan dan sosialisasi Kelurahan/Kalurahan tanpa kekerasan anak	Jumlah Kelurahan/Kalurahan yang mencanangkan Kelurahan/Kalurahan tanpa kekerasan	218 desa	250	300	350	400	438	DP3AP2	KPAI, Polda, Dinas Sosial	
		Pengembangan sistem evaluasi dan <i>monitoring</i> pelindungan anak	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan sistem	-	5 Kabupaten/Kota	DP3AP2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Polda, Dinas Sosial					

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			evaluasi dan <i>monitoring</i> perlindungan anak								
		Pembinaan dan fasilitasi ketersediaan SDM, sarana dan prasarana memadai untuk pelayanan anak korban kekerasan dan terlantar	Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai ketersediaan SDM, sarana dan prasarana memadai untuk pelayanan anak korban kekerasan dan terlantar	-	5 Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten / Kota	5 Kabupaten n/ Kota	5 Kabupaten n/ Kota	5 Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, BKKBN
		Peningkatan peran forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Forum anak sebagai 2P dalam mencegah KTA	-	5 Kabupaten n/ Kota	5 Kabupaten n/ Kota	5 Kabupaten n/ Kota	5 Kabupaten n/ Kota	5 Kabupaten / Kota	DP3AP2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Polda, Dinas Sosial
		Pendampingan kader forum anak terlatih dalam penyusunan profil anak	Jumlah forum anak terlatih dalam penyusunan profil anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	25 forum anak	50 forum anak	75 forum anak	100 forum anak	125 forum anak	DP3AP2	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM, Akademisi
		Pembinaan lembaga pelayanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	-	5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten n /Kota	5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten /Kota	DP3AP2	Dinas Sosial, KPAI, Biro Bina Mental Spiritual, Forum Anak, LSM

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Penyusunan standar layanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	Adanya standar layanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2	Dinas Sosial, KPAI, Biro Bina Mental Spiritual, Forum Anak, LSM
		Pembentukan SDM terlatih manajemen kasus kekerasan	Jumlah kabupaten/kot a yang memiliki SDM terlatih manajemen kasus kekerasan	-	5 Kabupaten/Kota	DP3AP2	Dinas Sosial, KPAI, Biro Bina Mental Spiritual, Forum Anak, LSM				
Belum optimalnya pemulihan fisik dan psikologis anak korban kekerasan.	2.Pentingnya pemulihan fisik dan psikologis anak korban kekerasan	Program pemulihan psikologis untuk anak korban kekerasan	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang mengikuti program pemulihan psikologis	478 anak	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, KPAI DIY, NGO
		Layanan pemulihan fisik anak korban kekerasan	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang mengikuti program pemulihan kesehatan (fisik)	478 anak	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Kesehatan	DP3AP2, Dinas Sosial, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, KPAI DIY, NGO
	3.Memperkuat peraturan, institusi, dan supremasi hukum terkait penanganan segala bentuk kekerasan terhadap anak.	Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.	Bertambahnya penegak hukum yang memiliki perspektif Hak anak	-	100 APH	200 APH	300 APH	400 APH	500 APH	DP3AP2	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM; Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Bermas, Kementerian Agama DIY, LSM

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	4. Memperluas kesempatan bagi anak untuk mengakses layanan yang dapat melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan anak.	Penguatan layanan dan peningkatan jumlah Telepon sahabat anak dan keluarga (Tesaga) di Kabupaten/kota yang mudah diakses oleh anak.	Meningkatnya jumlah Telepon sahabat anak dan keluarga (Tesaga) di kabupaten/kota	-	10	20	30	40	50	DP3AP2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama DIY
	5. Memberdayakan anak-anak dalam hal literasi & keamanan digital dengan mengoptimalkan Penguatan inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi melalui penguatan kinerja Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan.	Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan optimalisasi layanan digital	Bertambahnya jumlah pelatihan literasi digital untuk anak dan remaja di kabupaten/kota di DIY	-	5	10	10	10	10	DP3AP2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	6. Lindungi dan tingkatkan kesehatan mental orang tua dan hubungan mereka dengan perawatan lebih lanjut	Layanan konseling untuk orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan.	Jumlah layanan konseling psikologis yang bisa diakses orang tua di tingkat desa	70	80	90	100	110	120	Dinas Kesehatan	Perguruan Tinggi, HIMPSI DIY, Puskesmas

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	sesuai kebutuhan. (layanan konseling yang bisa diakses secara gratis)										
	7.Optimalisasi penyuluhan hukum, pembinaan & pendampingan para orang tua dari anak-anak yang menjadi korban atau anak-anak yang terlibat dalam kejahatan anak di jalanan.	Penyuluhan hukum, pembinaan, dan pendampingan untuk orang tua yang anaknya menjadi korban atau terlibat kejahatan jalanan.	Sejumlah sosialisasi/pelatihan untuk orang tua yang anak-anaknya menjadi korban/terlibat kejahatan jalanan	-	5	5	5	5	5	DP3AP2	Biro Pemberdayaan Masyarakat, Biro Bina Mental Spiritual, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Belum optimalnya pelayanan anak dengan perilaku menyimpang	8.Peningkatan pelayanan anak dengan perilaku sosial menyimpang	Belum optimalnya pelayanan anak dengan perilaku menyimpang	Persentase Peningkatan pelayanan anak dengan perilaku sosial menyimpang	102 anak pelaku kejahatan jalanan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	DP3AP2	KPAI, LSM, Forum Anak,
		Publikasi media KIE melalui media publik tentang anak dengan perilaku sosial menyimpang	Persentase Jumlah media KIE melalui media publik tentang anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan perilaku sosial menyimpang	-	5 %	10 %	15 %	20 %	30 %	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
<b>A.2. Kekerasan Seksual pada Anak</b>											
Masih tingginya angka pernikahan	1.Optimalisasi penurunan angka pernikahan	Optimalisasi wajib belajar 14 tahun	Persentase meningkat angka partisipasi	429.472 orang	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Kementerian Agama DIY, Dinas

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
dini karena kehamilan yang tidak dikehendaki dan dampaknya bagi perempuan	dini di kabupaten/kota di DIY		murni Pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.								Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, NGO
		Membangun sistem dan mekanisme pencegahan pernikahan usia dini di desa mandiri budaya dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga dan sekolah	Tersedia sistem dan mekanisme pencegahan pernikahan usia diri		ada	ada	ada	ada	ada	Kanwil Kemenag	DP3AP2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, NGO
		Program Desa Prima. Memperkuat program “Desa Prima” di desa mandiri budaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa mandiri budaya Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Sleman	Peningkatan jumlah program Desa Prima	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	DP3AP2	Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Kalurahan
		Meningkatkan kaderisasi dan kepemimpinan remaja dan pemuda perempuan untuk menjadi	Jumlah remaja putri yang mengikuti kaderisasi kepemimpinan	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	DP3AP2	Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan, Badan Kesatuan Bangsa dan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		penggerak program “Desa Prima” di desa mandiri budaya									Politik, Kalurahan
	2.Optimalisasi pendidikan pra-nikah bagi pemuda di DIY yang terintegrasi dengan KUA.	Peningkatan mutu Pendidikan pra nikah	Ada peraturan dan desain Pendidikan pranikah di DIY.	0	1	0	0	0	0	Kementerian Agama DIY	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian PMK, Kementerian Agama
	3.Optimalisasi pengawasan, pendampingan, dan pemberdayaan anak yang melakukan pernikahan dini	Program ketahanan keluarga bagi pasangan menikah muda (usia dini)	Jumlah keluarga muda (pasangan usia dini) yang memperoleh layanan penguatan ketahanan keluarga.	330 pasangan menikah dini	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DP3AP2	Kementerian Agama DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, NGO
	4.Optimalisasi upaya menurunkan angka perceraian di DIY	Program ketahanan keluarga bagi pasangan menikah muda (usia dini)	Adanya Pendidikan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup pendidikan orang dewasa (orang tua) di DIY	-	Ada dan terlaksana	DP3AP2	Kementerian Agama DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, NGO				
		Penyelenggaraan pendidikan pra nikah	Bertambahnya durasi pendidikan pranikah	-	Ada dan terlaksana	DP3AP2	Kementerian Agama DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, NGO				
		program penurunan Angka perceraian	Persentase Jumlah pasangan bercerai di kabupaten/Kot	5942	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	DP3AP2

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			a menurun								Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, NGO
		Wajib konseling pada calon pengantin dengan dispensasi kawin	Adanya payung hukum pelaksanaan wajib konseling pada calon pengantin dengan dispensasi kawin		ada	ada	ada	ada	ada	DP3AP2	Kementerian Agama DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, NGO
			Jumlah calon pengantin yang mengikuti wajib konseling.		20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	DP3AP2	Kementerian Agama DIY, Dikpora, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, NGO
		Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).	Jumlah anak dan remaja yang mengikuti kegiatan kampanye/ sosialisasi		20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	DP3AP2	Kanwil Kemenag DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, NGO
	5.Optimalisasi pendampingan, dan pemberdayaan keluarga yang mengalami perceraian di DIY	Layanan konseling dan pendampingan pasangan bercerai.	Jumlah layanan Konseling/ Konsultasi di tingkat Kecamatan.	70	72	74	76	78	78	DP3AP2	Kanwil Kemenag DIY
			Persentase Jumlah istri/atau suami yang memperoleh pendampingan & pemberdayaan pasca perceraian di	23% perceraian hidup	20% perceraian hidup	40% perceraian hidup	60% perceraian hidup	80% perceraian hidup	100% perceraian hidup	DP3AP2	Kanwil Kemenag DIY

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			tingkat kabupaten/kot a di DIY								
	6.Optimalisasi pemberdayaan ekonomi warga pelaku pernikahan dini dan/atau perceraian dengan membangun ekosistem UMKM di tingkat kabupaten/Kota	Membangun ekosistem kewirausahaan khususnya untuk keluarga pasangan muda (nikah dini) dan pasangan bercerai	Ada sentra inkubasi entrepreneurship untuk pasangan pelaku pernikahan dini di tingkat kabupaten/kot a	0	5	10	15	20	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Dinas Kebudayaan
		Peningkatan peran sosial bumdes dama membangun ketahanan perekonomian keluarga	Persentase Jumlah janda/duda yang terlibat dalam unit-unit layanan bumdes.	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, DP3AP2, Kalurahan, Bumdes
	7.Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pemuda di DIY	Sosialisasi dan pelatihan pendidikan reproduksi untuk anak dan remaja di tingkat kalurahan di DIY	Jumlah pelatihan kesehatan reproduksi untuk pemuda di DIY di tingkat kabupaten/kot a	0	5	10	15	20	25	Dinas Kesehatan	NGO, Forum Anak
			Persentase Jumlah peserta pelatihan kesehatan reproduksi untuk pemuda di DIY di	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Kesehatan	NGO, Karangtaruna, Forum anak,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			tingkat kabupaten/kot a								
	8.Mengurangi pernikahan anak melalui pendidikan keterampilan hidup di sekolah dan memperkuat platform kesehatan berbasis sekolah.	Penyelenggara n program <i>life skill education</i> bagi anak-anak dan remaja.	Desain program <i>Life skill education</i> (semacam markoding) untuk remaja, SMP/SMA di DIY	0	2	4	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas pariwisata
		Konseling Go to school (psikolog/ Konselor <i>go to School</i> )	Jumlah psikolog/ Konselor yang terlibat	-	50	100	150	200	250	DP3AP2	RDU, HIMPSI DIY, Puskesmas, Dikpora, Institusi Sekolah, Dewan pendidikan
		Pembentukan kelompok sebaya untuk ruang bercerita (sahabat cerita)	Jumlah anak yang menjadi Sahabat cerita yang terlatih	-	50 Sahabat cerita (peer)	100 Sahabat cerita (peer)	150 Sahabat cerita (peer)	200 Sahabat cerita (peer)	250 Sahabat cerita (peer)	DP3AP2	RDU, HIMPSI DIY, Puskesmas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Institusi Sekolah, Dewan Pendidikan
Terbukanya akses pada pornograsi, pornoaksi, dan eksploitasi tubuh dan seksual pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan,	9.Pentingnya informasi sehat bagi anak untuk pencegahan pornografi, kekerasan seksual di dunia digital	Pelibatan konten creator / Influencer untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak	Jumlah influencer yang terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual	-	5	10	15	20	25	DP3AP2	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas sosial, KPAI, Forum Anak, Influencer
		Penegakan aturan penyedian aplikasi dan informasi di dunia digital.			terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	DP3AP2	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, KPAI, POLDA

### B. Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

#### B.1. Anak Penyandang Disabilitas

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Belum optimalnya pelayanan pelayanan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	1.Peningkatan pelayanan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Pembentukan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Publikasi media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Pendampingan dan pelatihan bagi lembaga yang menangani anak berkebutuhan khusus	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus	-	5 Lembaga di 5 kabupate n/ kota	10 Lembaga di 5 kabupaten/ kota	Dinas Sosial				
Belum optimalnya praktik praktik sekolah/pendidikan Inklusif di DIY.	2.Membentuk model inklusi dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi	Penguatan Program Sekolah Inklusi	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki kapasitas pelaksanaan program sekolah/pendidikan inklusif.	79 kepala sekolah-madrasah / guru	90 kepala sekolah-madrasah / guru	100 kepala sekolah-madrasah / guru	120 kepala sekolah-madrasah / guru	140 kepala sekolah-madrasah / guru	160 kepala sekolah-madrasah/ guru	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Biro Bina Mental Spiritual, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Institusi Sekolah, NGO, Kementerian Agama DIY
		Bertambahnya model sekolah inklusif disemua jenjang di DIY		229 Sekolah/ Madrasah	251 Sekolah/ Madrasah	273 Sekolah/ Madrasah	295 Sekolah/ Madrasah	317 Sekolah/ Madrasah	339 Sekolah/ Madrasah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Biro Bina Mental Spiritual, Biro Bina Pemberdayaan masyarakat, Institusi

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
											Sekolah, NGO, Kementerian Keagamaan DIY
	3.Pengembangan Manajemen Sekolah Inklusif	Pelatihan/ <i>workshop</i> kepala sekolah, guru kelas, dan guru pendamping khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI)	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki kapasitas pelaksanaan program sekolah/pendidikan inklusif.	79 kepala sekolah-madrasah / guru	90 kepala sekolah-madrasah / guru	100 kepala sekolah-madrasah / guru	120 kepala sekolah-madrasah / guru	140 kepala sekolah-madrasah / guru	160 kepala sekolah-madrasah/ guru	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Biro Bina Mental Spiritual, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Institusi Sekolah, NGO, Kementerian Agama DIY
Belum optimalnya mengarusutamakan pasarpasal UNCRPD dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities di DIY.	4.Pentingnya peningkatan kapasitas pelayanan sosial (PEKSOS) dan panti-panti rehabilitasi untuk anak dengan disabilitas dengan prinsip-prinsip dasar CRPD.	<i>Workshop</i> CRPD untuk PEKSOS dan Pengurus Panti-panti rehabilitasi di kabupaten/Kota di DIY	Jumlah <i>Workshop</i> CRPD yang diselenggarakan di tiap kabupaten/kota di DIY	-	5	5	5	5	5	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, DP3AP2, HIMPSI, RDU, Panti Rehabilitasi (BRSR),
			Jumlah peserta (PEKSOS, pengurus lembaga rehabilitasi) yang mengikuti <i>Workshop</i> CRPD.	90	100	110	120	130	140	Dinas Sosial	Dinas kesehatan, DP3AP2, HIMPSI, RDU, panti rehabilitasi (BRSR),
	5.Membangun akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk anak dengan disabilitas	Fasilitasi transportasi khusus untuk anak-anak dengan disabilitas untuk mengakses	Adanya transportasi khusus untuk anak-anak disabilitas untuk memperoleh Pendidikan di	-	Ada dan mudah diakses	Ada dan mudah diakses	Ada dan mudah diakses	Ada dan mudah diakses	Ada dan mudah diakses	Ada dan mudah diakses	Dinas Perhubungan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	(UN CRPD).	Pendidikan.	kabupaten/kot a								
	6. Model perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.	Pendidikan orang tua khusus anak dengan penyandang disabilitas (fisik maupun psikososial/mental)	Adanya lembaga pengasuhan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang bisa diakses secara gratis	-	117	128	139	150	161	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, DP3AP2, HIMPSI, RDU, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)
<b>B2. Anak Jalanan</b>											
Belum optimalnya peran lembaga pengasuhan alternatif	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan lembaga pengasuhan alternatif.	Pelindungan bagi anak yang hidup di jalan / AHJ melalui lembaga pengasuhan alternatif	Jumlah anak jalanan di lembaga pengasuhan alternatif	67	50	40	30	20	10	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, Satpol PP, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat,
		Bimbingan Sosial Pelayanan dan pelindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Pelindungan Sosial	Jumlah rumah pelindungan sosial yang mendapatkan bimbingan	9	9	9	9	9	9	Dinas sosial	DP3AP2, KPAI, Satpol PP, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat,
	2. Peningkatan proaktifnya kelurahan untuk menyusun Peraturan Kelurahan/ Kalurahan ketahanan	Penyusunan Peraturan tentang ketahanan keluarga di Kelurahan/ Kalurahan di DIY.	Persentase Jumlah Peraturan tentang ketahanan keluarga di tingkat Kelurahan/ Kalurahan	100 Peraturan Kelurahan/ Kalurahan	40 %	55 %	70 %	85 %	100 %	Biro Tata Pemerintahan	DP3AP2, KPAI, Satpol PP, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan/ Kelurahan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	keluarga untuk memperkuat kontrol orang tua terhadap anak yang berpotensi menjadi ABH										
Belum optimalnya layanan asesmen psikologi sosial dan hukum anak yang hidup di jalanan.	3. Asesmen psikologi sosial anak-anak di lingkup komunitas rawan kenakalan anak di jalanan di DIY.	Fasiltiasi assesmen psikologi bagi anak yang hidup di jalan (AHJ)	Jumlah anak yang diasesmen	67 anak jalanan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, POLDA, DP3AP2, KPAI, Satpol PP, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan/ Kelurahan, Institusi Sekolah, NGO
	4. Asesmen psikologi, sosial, dan hukum di lingkup keluarga di DIY	Fasilitasi asesmen hukum anak yang hidup di jalan (AHJ)	Jumlah keluarga yang diasesmen	67 keluarga dari anak jalanan	60 keluarga dari anak jalanan	50 keluarga dari anak jalanan	40 keluarga dari anak jalanan	30 keluarga dari anak jalanan	20 keluarga dari anak jalanan	Dinas Sosial	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, POLDA, DP3AP2, KPAI, Satpol PP, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan/ Kelurahan, Institusi Sekolah, NGO, Pusat Pembelajaran Keluarga
Updating pemetaan lingkungan rawan	5. Optimalisasi kajian pemetaan lingkungan	Pendataan dan pemetaan lingkungan rawan	Adanya dokumen kajian pemetaan	0	0	0	1	0	0	Biro Bermas	Badan Perencanaan dan Pembangunan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
kenakalan anak	rawan kenakalan anak di jalanan di lingkup tri pusat pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat yang di-update secara berkala.	kenakalan anak									Daerah, Dinas Sosial, DP3AP2, KPAI, Satpol PP, Institusi Sekolah, NGO
Belum optimalnya sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi anak yang hidup di jalan.	6.Peningkatan sosialisasi pencegahan kenakalan anak di jalanan bagi keluarga di DIY	Sosialisasi Pencegahan kenakalan anak di Jalanan bagi keluarga,	Jumlah keluarga yang mengikuti sosialisasi	-	200	300	400	500	600	DP3AP2	Pusat Pembelajaran Keluarga, NGO, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
	7. Peningkatan penyuluhan hukum terkait kenakalan anak di jalanan atau Anak Berhadapan Hukum (ABH) di lingkup keluarga di DIY	Sosialisasi penyuluhan hukum tentang kenakalan anak di Jalanan dan anak berhadapan dengan hukum bagi keluarga,	Jumlah keluarga yang mengikuti penyuluhan	-	200	300	400	500	600	DP3AP2	Satpol PP, Dinas Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda, Forum Anak, Satpol PP, LBH
	8.Pentingnya Penyusunan pedoman hukum terkait penanganan kenakalan anak di	Penyusunan pedoman hukum terkait penanganan kenakalan anak di jalanan atau ABH di lingkup	Adanya dokumen pedoman hukum penanganan kenakalan anak dalam bagi keluarga		-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	jalanan atau ABH di lingkup keluarga di DIY	keluarga di DIY									Yogyakarta, Polda, Forum Anak, Satpol PP, LBH
	9.Pentingnya optimalisasi penyuluhan hukum tentang UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan PP nomer 65 tahun 2015 untuk keluarga, masyarakat, dan sekolah	Penyuluhan Hukum sistem peradilan Pidana Anak bagi penegak Hukum.	Jumlah peserta penyuluhan.	-	100 APH	200 APH	300 APH	400 APH	500 APH	DP3AP2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peradilan, Polda
Optimalisasi Kerjasama lintas sektoral.	10.Optimalisasi alokasi anggaran untuk penanganan kenakalan anak di jalanan di DIY.	Peningkatan Anggaran penanganan kejahatan anak jalanan di DIY.	Persentase Peningkatan anggaran untuk penanganan kenakalan anak di jalanan	-	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	DP3AP2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Institusi Sekolah, Polda
<b>b.3. Anak Terlantar</b>											
Belum optimalnya pelayanan bagi anak-anak terlantar.	1.Pentingnya penguatan perlindungan, pengasuhan, dan pengembangan sosial anak terlantar di DIY.	Pelindungan, pengasuhan, dan pengembangan sosial anak terlantar	Jumlah anak yang mendapatkan Pelindungan, pengasuhan, dan pengembangan sosial anak terlantar	9607 anak terlantar	8000 anak terlantar	7000 anak terlantar	6000 anak terlantar	5000 anak terlantar	4000 anak terlantar	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	2.Meningkatkan akses ke layanan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi anak dan keluarga yang rentan.	Program kesejahteraan sosial anak terintegrasi (PKSAI)	Jumlah anak yang mengakses layanan kesejahteraan sosial anak terintegrasi (PKSAI)	9607 anak terlantar	8000 anak terlantar	7000 anak terlantar	6000 anak terlantar	5000 anak terlantar	4000 anak terlantar	Dinas Sosial	DP3AP2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Mental Spiritual, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, LPA, RDU
Masih adanya praktik-praktik pengasuhan keluarga yang cenderung “menelantarkan anak”.	3.Pentingnya optimalisasi penguatan ketahanan keluarga yang ditopang oleh program pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dari kalurahan/desa di DIY	Peningkatan jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga di tiap-tiap Kelurahan/ Kalurahan di Kabupaten/Kota.	Jumlah konselor	-	250	300	350	400	438	DP3AP2	Dinas Sosial, Kelurahan/ Kalurahan, Pusat Pembelajaran Keluarga
			Jumlah program ketahanan keluarga di tingkat Kelurahan/ Kalurahan	-	1 tiap desa	DP3AP2	Dinas Sosial, Kelurahan/ Kalurahan				
	4.Optimalisasi mitigasi, penanganan, dan transformasi konflik keluarga oleh “lembaga-lembaga mediasi konflik” berbasis komunitas di lingkup kalurahan di DIY.	Pembentukan lembaga mediasi desa di tiap-tiap kelurahan di Kabupaten/Kota di DIY	Adanya lembaga mediasi desa dan peer group education untuk remaja di DIY	-	1 tiap desa	DP3AP2	Biro Hukum, Biro Pemberdayaan Masyarakat,				
<b>B.4. Anak Minoritas dan terisolasi</b>											
Masih adanya kasus-kasus diskriminasi pada anak-	1.Pentingnya membangun kesadaran keberagaman	Program pengembangan gerakan aksi solidaritas	Persentase Jumlah anak yang telah mengikuti		20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
anak minoritas baik lingkungan sekolah maupun layanan publik lainnya	di lingkungan sekolah	lintas agama-kepercayaan untuk penguatan keberagaman dan kebhinnekaan DIY	program kebhinekaan dan toleransi								DP3AP2, Dewan Pendidikan, Dewan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Institusi Sekolah
			Jumlah kasus diskriminasi atas nama agama dan kelompok		0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, DP3AP2, Dewan Pendidikan, Dewan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Institusi Sekolah
		Fasilitasi pendidikan bagi anak-anak penghayat kepercayaan	Jumlah penyuluh untuk pendidikan penghayat kepercayaan		5	10	15	20	25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Kelompok Penghayat, Dewan Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Institusi sekolah, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			Modul/bahan ajar bagi anak-anak penghayat kepercayaan		0	0	1 Modul	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	MLKI, Kelompok Penghayat, Dewan Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Institusi sekolah, NGO
Masih adanya anak dan remaja pelaku kasus bunuh diri di DIY	2.Pentingnya membangun kesehatan mental anak dan remaja pasca pandemi covid-19	Program pencegahan bunuh diri/pulung gantung melalui mainstreaming isu kesehatan mental untuk pemuda terutama di kabupaten Gunungkidul dan Sleman	Adanya desain penguatan kesehatan mental anak dan remaja		0	Ada	0	0	0	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, DP3AP2, Dinas Kebudayaan, NGO, Kalurahan/ Kelurahan

**C. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.**

**C.1. Anak berhadapan Hukum**

Belum optimalnya penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum	1.Peningkatan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi	Pembinaan khusus anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah pembinaan khusus anak yang berhadapan dengan hukum	-	5	10	15	20	25	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Diversi bagi anak ABH	Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi	65		40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Pelaksanaan mandiri merdeka belajar di LPKA	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar	-	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Layanan hak terintegrasi bagi ABH	Persentase ABH yang memperoleh layanan hak terintegrasi	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Pembinaan layanan LPKA terstandarisasi	Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan standar	-	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Penyediaan Lembaga Penyelenggara n Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS di kabupaten/kot a	6	6	6	6	6	6	Dinas Sosial	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
		Pendampingan forum koordinasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	-	5	5	5	5	5	Dinas Sosial	DP3AP2, Dinas Kesehatan
		Pendampingan ABH	Peningkatan kapasitas ABH	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Kelurahan/ Kalurahan dalam mencegah anak agar tidak menjadi ABH	Persentase Jumlah Kelurahan/ Kalurahan yang difasilitasi dalam pencegahan anak agar tidak menjadi ABH	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, Dinas Kesehatan
Belum optimalnya peningkatan Kualitas Aparat penegak Hukum (APH)	2.Memastikan bahwa hukum peradilan anak dipahami dan diterapkan di	Program Polisi sahabat anak yang menguasai pemenuhan hak anak dan perlindungan	Jumlah polisi hak anak yang terstandarisasi .	-	100 APH	200 APH	300 APH	400 APH	500 APH	Kepolisian Daerah (POLDA)	Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, KPAI, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
dalam menangani kasus-kasus anak.	semua tingkat dalam sistem peradilan	anak									
	3.Mempromosikan penahanan sebagai upaya terakhir dan memenuhi hak keadilan bagi semua anak yang terlibat dengan hukum	Rehabilitasi anak diluar penahanan.	Persentase Jumlah anak yang direhabilitasi diluar penahanan.	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	Polda, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, DP3AP2, KPAI DIY, NGO
	4.Meningkatkan penyediaan layanan perlindungan anak yang berkualitas untuk anak-anak dan keluarga yang paling berisiko dan rentan – dari deteksi dini, hingga manajemen kasus, dan rujukan.	Fasilitasi konseling hukum bagi anak dari keluarga rentan yang berhadapan dengan hukum.	Persentase Jumlah anak dari keluarga rentan yang memperoleh layanan		20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Dinas Sosial	Polda, LBH, NGO, DP3AP2
	5.Pentingnya peningkatan penyuluhan hukum terkait kenakalan anak di	Penyuluhan hukum untuk Siswa SMP/SMA di DIY	Jumlah sekolah yang terlibat dalam sosialisasi penyuluhan hukum	-	50	100	150	200	250	Kanwil kemenkumham DIY	DP3AP2, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Pemberdayaan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	jalanan atau Anak Berhadapan Hukum di lingkup sekolah di DIY										Masyarakat, Institusi Sekolah, NGO
	6.Pentingnya optimalisasi penyusunan dan diseminasi pedoman hukum untuk penanganan kenakalan anak di jalanan atau Anak Berhadapan Hukum (ABH) di lingkup sekolah di DIY	Penyusunan Modul diseminasi pedoman hukum untuk penanganan anak berhadapan dengan hukum di sekolah.	Adanya dokumen pedoman hukum untuk penanganan kenakalan anak jalanan dan atau ABH di DIY.	-	0	0	1 Modul	0	0	Kanwil kemenkumham DIY	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Institusi Sekolah, NGO
	7.Optimalisasi penyuluhan hukum terkait ABH di lingkup masyarakat kalurahan di DIY	Penyuluhan hukum untuk aparat Kelurahan/ Kalurahan dan karangtaruna.	Jumlah sosialisasi hukum terkait ABH di tingkat Kelurahan/ Kalurahan di DIY	-	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	Kanwil Kemenkumham DIY	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, NGO
Bimbingan konseling di sekolah masih dianggap “momok” bagi siswa dan bersifat penghukuman	8.Optimalisasi konseling siswa yang berpotensi menjadi pelaku kenakalan anak di	Konseling siswa berbasis pemenuhan hak anak	Pedoman standar konseling siswa berbasis pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	-	0	0	0	1 Modul	0	Dinas Pendidikan dan olahraga	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Sosial

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	jalanan atau ABH.	Pelatihan guru BK terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Jumlah guru BK yang terstandar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	-	5% total Guru BK di DIY	10% total Guru BK di DIY	15% total Guru BK di DIY	20% total Guru BK di DIY	25% total Guru BK di DIY	Dinas Pendidikan dan olah raga	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Sosial
		Rebranding guru BK di sekolah.	BK ramah anak	-	5% total Guru BK di DIY	10% total Guru BK di DIY	15% total Guru BK di DIY	20% total Guru BK di DIY	25% total Guru BK di DIY	Dinas Pendidikan dan olah raga	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Sosial
	9. Asesmen psikologi sosial anak-anak di lingkup komunitas rawan kenakalan anak di jalanan di DIY	Pelaksanaan Asesmen Psikologis untuk anak-anak yang berpotensi menjadi ABH di Kawasan rawan kenakalan anak.	Jumlah anak yang mengikuti asesmen psikologi di lingkup komunitas rawan kenakalan anak jalanan di DIY	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, POLDA, Biro Bina Mental Spiritual, KPAI DIY, NGO
	10.Pentingnya pemulihan psikologis ABH	Program pemulihan psikologis untuk ABH	Jumlah anak ABH yang mengikuti program pemulihan psikologis	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, POLDA, Biro Bina Mental Spiritual, KPAI DIY, NGO
Masih lemahnya koordinasi dan Kerjasama lintas sektoral di DIY.	11.Pentingnya optimalisasi forum komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara sekolah, kalurahan, keluarga, dan	Koordinasi lintas <i>stakeholder</i>	Jumlah pertemuan / koordinasi antar stakeholder	-	4/tahun	4/tahun	4/tahun	4/tahun	4/tahun	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	DP3AP2, HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, POLDA, Biro Bina Mental Spiritual, KPAI DIY, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	anak yang berpotensi menjadi ABH										
	12.Optimalisasi perencanaan program pendidikan anak dalam keluarga dalam lingkup Desa Budaya atau Desa Mandiri Budaya agar tercipta lingkungan komunitas warga yang sehat bagi tumbuh kembang anak	Pelibatan anak dan forum anak dalam perencanaan program Pendidikan keluarga dalam lingkup desa mandiri budaya.	Jumlah anak yang terlibat dalam implementasi desa budaya atau desa mandiri budaya.	-	500 anak	500 anak	500 anak	500 anak	500 anak	DP3AP2.	HIMPSI, RDU, Institusi Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, POLDA, Biro Bina Mental Spiritual, KPAI DIY, NGO, Forum Anak, Paniradya Kaistimewan, Dinas Kebudayaan, Kalurahan
	13.Optimalisasi fasilitasi program wajib belajar 12 tahun bagi ABH yang tengah menjalani pembinaan di LPKA/LPSA melalui MoU dengan Pemerintah Kabupaten (SMP) dan Pemerintah Provinsi (SMA).	Fasilitasi Pendidikan 12 tahun untuk anak ABH	Menurunnya jumlah anak ABH yang ditolak kembali ke sekolah asalnya.	-	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	LPK/LSPA, DP3AP2, Institusi Sekolah

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	14. Optimalisasi layanan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi terhadap ABH yang tengah menjalani pembinaan di LPKA/LPSA	Layanan PPKS	Meningkatnya jumlah anak yang mengakses layanan kesejahteraan sosial dari dinas sosial.	102.746,00 anak	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Dinas Sosial	DP3AP2, LPKA/LPSA
	15. Optimalisasi program pendampingan, perlindungan & rehabilitasi sosial anak di lingkup Balai Pembinaan & Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di DIY	Peningkatan layanan untuk ABH di BPRSR di DIY.	Kapasitas BPRSR meningkat		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BPRSR	Dinas Sosial, DP3AP2
Belum terpetakan nilai-nilai yang dihidupi oleh genk, kelompok-kelompok genk di DIY.	16. Perlu pemetaan nilai-nilai yang dihidupi kelompok-kelompok genk, & kejahatan jalanan dengan	Amputasi lingkungan negatif	Tersedia mekanisme pencegahan lingkungan negatif		Ada dan terlaksana	Dinas Sosial	Polda, DP3Ap2, Dinas Sosial, Satpol PP, Perguruan Tinggi, NGO				
		Reintegrasi Sosial	Jumlah anak yang mengikuti program reintegrasi sosial	-	126 ABH	Dinas Sosial	Polda, DP3AP2, Dinas Sosial, Satpol PP, Perguruan Tinggi, NGO				

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	membangun komunikasi intens agar kejahatan jalanan tidak merembet pada kasus-kasus lainnya: trafiking, kekerasan seksual & HIV AIDS-	Pembelajaran <i>Life skill</i> dan Magang kerja untuk ABH	Jumlah anak yang diterima magang	-	126 ABH	126 ABH	126 ABH	126 ABH	126 ABH	Dinas Sosial	Polda, DP3AP2, Dinas Sosial, Satpol PP, Perguruan Tinggi, NGO

### C.2. Anak korban /terlibat jaringan terorisme

Belum optimalnya pelayanan bagi anak korban terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya	1.Peningkatan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya	Pembentukan forum koordinasi penanganan anak jaringan terorisme di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum koordinasi anak jaringan terorisme di Kabupaten/Kota	-	1 tiap kabupaten/kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda, DP3AP2				
		Pendampingan dan sosialisasi Kelurahan/Kalurahan anti terorisme	Jumlah Kelurahan/Kalurahan yang diberikan fasilitas dalam pencegahan anak agar tidak menjadi korban dari jaringan terorisme	42 KSB	46 KSB	50 KSB	54 KSB	54 KSB	62 KSB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Polda, DP3AP2
		Jumlah kegiatan budaya dalam ruang lingkup desa budaya dan desa	Jumlah kegiatan budaya dalam ruang lingkup desa budaya dan desa	22 DMB	32 DMB	42 DMB	52 DMB	62 DMB	72 DMB	Dinas kebudayaan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kantor Wilayah

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			mandiri budaya yang diikuti oleh anak mantan terorisme								Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda, DP3AP2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Paniradya Kaistimewan
	2. Menyediakan bimbingan serta bantuan apapun, baik secara fisik maupun moral, yang menjadi penguat bagi anak untuk dapat kembali melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik	Program layanan psikososial bagi anak korban jaringan terorisme.	Jumlah kegiatan pembimbingan dan bantuan psikososial bagi anak pelaku terorisme kab/kota	-	5	5	5	5	5	DP3AP2	Dinas Sosial, , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, LPA,
Masih adanya stigma dan diskriminasi dari orang dewasa dan masyarakat terhadap anak-anak korban jaringan terorisme.	3. Penguatan kesadaran pada masyarakat untuk bisa menerima anak mantan terorisme dengan terbuka, tidak membedakan dengan yang lain.	Fasilitasi keterlibatan anak korban jaringan terorisme dalam kegiatan sosial dan kebudayaan.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan anak mantan terorisme dalam kegiatan sosial-kebudayaan. Kab/kota	--	5	5	5	5	5	Dinas Kebudayaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, KPAI, Paniradya Kaistimewan, Kalurahan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### C.3. Anak yang mengalami perundungan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Masih adanya kasus-kasus perundungan anak baik di sekolah, masyarakat, maupun keluarga baik secara online maupun offline.	1. Pentingnya mengimplementasikan pendekatan "Roots model" sebagai cara memutus mata rantai perundungan disekolah.	Program Roots Model.	Jumlah kelompok anak/remaja yang mengikuti program "roots model"	-	25	50	75	100	125	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Biro Bina Mental Spiritual, RDU, Institusi Sekolah, Perguruan Tinggi
			Jumlah anak/remaja yang menjadi duta roots Model	250 Fasilitator muda	500 Fasilitator muda	750 Fasilitator muda	1000 Fasilitator muda	1250 Fasilitator muda	250 Fasilitator muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Biro Bina Mental Spiritual, RDU, Institusi Sekolah, Perguruan Tinggi
	2. Mengembangkan model sekolah inklusif di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tiap kabupaten/kota	Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di tiap jenjang Pendidikan di DIY	Jumlah sekolah inklusif	229 sekolah	251 sekolah	273 sekolah	295 sekolah	317 sekolah	339 sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Biro Bina Mental Spiritual, RDU, Institusi Sekolah, Perguruan Tinggi
			3. Penguatan anak-anak dalam hal literasi dan keamanan digital.	Sosialisasi digital Safety untuk anak-anak dan remaja di sekolah-sekolah di DIY	Desain kurikulum digital literasi, digital safety untuk anak-anak dan remaja.	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Jumlah anak yang mengikuti literasi digital	-	500	750	1000	1250	1500	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Mental Spiritual, RDU, Institusi Sekolah, Perguruan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
											Tinggi
<b>D. Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS, dan NAPZA)</b>											
<b>D.1. Anak Pengguna NAPZA</b>											
Masih belum optimalnya penanggulang an anak yang menjadi korban NAPZA	1. Peningkatan pelayanan bagi anak korban NAPZA	Rehabilitasi sosial bagi anak korban penyalahgunaa n NAPZA	Jumlah korban penyalahgunaa n napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi sosial	132	145	158	171	184	197	Dinas Sosial	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Dinas Kesehatan, DP3AP2
		Rehabilitasi dan fasilitasi rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba milik BNN	Jumlah anak penyalahgunaa n dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi BNN	66	72	78	84	90	96	BNNP	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP3AP2
	2.Pentingnya membangun proses rehabilitasi sosial bagi anak-anak korban penyalahgun aan NAPZA di kabupaten/k ota di DIY	Fasilitasi pengembangan kota/kabupate n Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah kabupaten/kot a berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	-	5	5	5	5	5	BNNP	Dinas Sosial, LSM, Forum Anak
		Fasilitasi kegiatan untuk proses akulturasi dengan masyarakat.	Jumlah kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, yang diikuti oleh anak korban penyalahgunaa n NAPZA di DIY	-	2	4	6	8	10	DP3AP2	Polda, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Masih minimnya pendidikan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	3.Pentingnya mengimplementasikan pengelolaan Pendidikan Layanan Khusus Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA di kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus untuk anak korban penyalahgunaan NAPZA.	Modeling Pendidikan Layanan Khusus	-	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AP2, Dewan Pendidikan, Institusi Sekolah
			Jumlah Pendidikan layanan khusus anak korban penyalahgunaan NAPZA	-	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AP2, Dewan Pendidikan, Institusi Sekolah
Belum Optimalnya sosialisasi dan pengawasan bahaya NAPZA pada kelompok rentan.	4.Pentingnya sosialisasi pada kelompok-kelompok rentan tentang bahaya NAPZA bagi kesehatan dan masa depan Anak	Kegiatan sosialisasi pada kelompok rentan tentang bahaya MAPZA	Jumlah anak yang mengikuti sosialisasi	-	100	200	300	400	500	Polda	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AP2, Dewan Pendidikan, Institusi Sekolah

#### D.2. Anak dengan HIV-AIDS

Masih tingginya angka HIV-AIDS baik pada orang dewasa dan anak-anak. Di DIY	1.Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;	Penyediaan Obat bagi anak penderita HIV/AIDS yang bisa diakses secara mudah dan gratis	Jumlah anak penderita HIV yang memperoleh pengobatan.	233 Anak	256 Anak	279 Anak	302 Anak	325 Anak	348 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY
			Jumlah anak penderita AIDS yang memperoleh pengobatan.	72 Anak	79 Anak	86 Anak	93 Anak	100 Anak	107 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY
			Jumlah obat yang tersedia untuk penderita	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Program Rehabilitasi menyeluruh bagi anak penderita HIV/AIDS	Jumlah layanan rehabilitasi yang disediakan khusus untuk anak dengan HIV/AIDS di 5 kalupaten kota.	305 Anak	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY
Masih minimnya pengetahuan anak terkait dasar reproduksi, penularan, dan pencegahannya	2. Program Pendidikan/ Pengetahuan HIV-AIDs dasar); pengenalan tentang tubuh dan reproduksi, proses penularan dan pencegahannya bagi anak-anak dengan HIV-AIDs di DIY	Sosialisasi kesehatan reproduksi untuk anak yang menderita HIV/AIDS	Jumlah anak penderita HIV/AIDS yang mengikuti pendidikan dasar AIDS (pengenalan tentang tubuh, reproduksi dan proses penularan serta pencegahannya)	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY
			Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kabupaten/Kota di DIY	-	2 kegiatan/tahun/kabupaten	3 kegiatan/tahun/kabupaten	4 kegiatan/tahun/kabupaten	5 kegiatan/tahun/kabupaten	6 kegiatan/tahun/kabupaten	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY
Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS pada penyediaan kesehatan tingkat pertama.	3. Penguatan program pengendalian HIV-AIDs dengan peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi orang tua dan orang dewasa	Pengendalian HIV/AIDS	Penguatan kapasitas petugas rumah sehat (puskesmas) di DIY	121 Puskesmas	121 Puskesmas	121 Puskesmas	121 Puskesmas	121 Puskesmas	121 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPA DIY
		Program pencegahan Anak dan remaja yang mengakses layanan prostitusi (pembeli)	Jumlah anak yang direhabilitasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Belum terintegrasinya layanan Multiple eliminasi dengan pelayanan KIA.	4. Mengoptimalkan program triple eliminasi (HIV, sifilis, dan hepatitis B) melalui layanan swasta di kabupaten & kota. Layanan pencegahan diintegrasikan ke pelayanan KIA, keluarga berencana & kesehatan remaja di semua tingkatan, termasuk di lembaga pelayanan kesehatan swasta.	Integrasi layanan KIA dengan program triple eliminasi (HIV, Hepatitis B, dan sifilis)	Adanya sistem terintegrasi	-	Ada	Ada dan terlaksana	Ada dan terlaksana	Ada dan terlaksana	Ada dan terlaksana	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPAI DIY
		Skrining deteksi dini pra persalinan terhadap penyakit HIV, Sifilis, Hepatitis B	Jumlah ibu hamil diskriming HIV, Sifilis, dan Hepatitis B	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPAI DIY
		prevention of mother to child transmission of HIV (PMTCT)	Jumlah NGO dan swasta yang terlibat dalam program eliminasi HIV-AIDS di DIY.	-	3	5	7	9	11	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, NGO, KPAI DIY
Belum optimalnya layanan psikosoal dan kesehatan mental anak penderita HIV/AIDS	5. Pentingnya optimalisasi asesmen psikologi, bantuan, pendampingan psikososial, hingga proses pemulihan dan pendampingan tumbuh kembang anak-anak yang terpapar HIV-AID dan/anak-	Pelaksanaan assessment psikologi secara berkala	Jumlah anak dengan HIV-AIDS yang mengikuti asesmen psikologi dan mendapat bantuan, pendampingan psikososial hingga proses pemulihan.	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, RDU, HIMPSI, NGO
		Layanan konseling psikologis bagi anak penderita HIV/AID	Jumlah anak yang mendapatkan layanan konseling	--	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, RDU, HIMPSI, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	anak dengan orang tua ODHA di DIY		psikologis								
		Pemberian bantuan dan pendampingan hingga proses pemulihan	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan dan bantuan untuk proses pemulihan.	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, DP3AP2, RDU, HIMPSI, NGO
Masih terjadinya praktik diskriminasi pada anak yang orang tuanya menderita HIV/AIDS dan/atau anak yang menderita HIV/AIDS	6.Pentingnya menghindari anak dari prasangka dan stigma dari masyarakat karena orang tua menderita HIV-Aids.	Program Pendidikan orang tua (Pendidikan orang dewasa)	Program Pendidikan orang tua untuk menghapus diskriminasi dan prasangka bagi anak dengan HIV AIDS	-	2 kegiatan/tahun/kabupaten	3 kegiatan/tahun/kabupaten	4 kegiatan/tahun/kabupaten	5 kegiatan/tahun/kabupaten	6 kegiatan/tahun/kabupaten	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, DP3AP2, RDU, HIMPSI, NGO
		Sosialisasi yang intensi pada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	-	5000	10000	15000	20000	25000	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, DP3AP2, RDU, NGO
		Program reintegrasi sosial	Jumlah anak dengan HIV/AIDS yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Sosial	DP3AP2, RDU, NGO
		Fasilitasi anak-anak dengan penderita HIV/AIDS untuk memperoleh hak pengasuhan, Pendidikan.	Jumlah anak yang mengikuti pada setiap jenjang Pendidikan	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Sosial	DP3AP2, RDU, NGO
			Jumlah anak yang yang menderita HIV/AIDS memperoleh orang tua	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Sosial	DP3AP2, RDU, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			asuh.								
		Fasilitasi pendidikan anak dengan HIV/AIDS	Jumlah anak dengan HIV/AIDS yang memperoleh hak dasar pendidikan di semua jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota	-	335 Anak	365 Anak	395 Anak	425 Anak	455 Anak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	DP3AP2, Kementerian Agama DIY, Institusi Sekolah,
<b>D.3. Anak dalam Situasi Bencana dan Konflik</b>											
Belum optimalnya pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	1. Pendampingan psikologi bagi korban bencana dan konflik	Pendampingan psikologi bagi korban bencana dan konflik	Persentase Jumlah anak korban bencana alam, konflik yang mendapatkan pendampingan psikologis (mental)	-	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	DP3AP2	BNPB, KPAl, LSM, Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga
			Persentase Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan psikologis pasca Covid 19	-	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Dinas kesehatan	BNPB, KPAl, LSM, Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, DP3AP2
		Sosialisasi edukasi bencana terhadap anak di lingkungan sekolah	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana di daerah rawan bencana	-	25	50	75	100	125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP3AP2, KPAl, LSM, Forum Anak,
Belum optimalnya pelibatan anak-anak daerah rawan bencana dan konflik dalam	2. Mengintegrasikan keterampilan untuk melindungi anak-anak dalam situasi	Pelatihan untuk fasilitator/pendamping anak/pekerja sosial terkait penguatan	Jumlah pendamping sosial/pekerja kesejahteraan sosial yang terlatih	90	100	110	120	130	140	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP3AP2, KPAl, LSM, Forum Anak,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
pengecahan dan mitigasi bencana	darurat ke dalam program dan sistem pelatihan yang ada untuk pekerja kesejahteraan sosial.	kecakapan melindungi anak-anak dalam situasi darurat.									
	3.Meningkatkan pengetahuan remaja terkait kebijakan dan kemampuan mereka untuk mengenali risiko bencana,	Pelatihan dan penguatan kapasitas menghadapi/memitigasi bencana pada anak-anak dan remaja	Jumlah remaja yang memiliki pengetahuan dan terlatih mengenali resiko bencana	-	25	50	75	100	125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,
	4.Mengarahkan remaja agar dapat terlibat dalam menciptakan perubahan sosial dan lingkungan yang signifikan.	Pelibatan anak-anak dan remaja dalam perencanaan pembangunan baik ditingkat desa atau kabupaten, khususnya di daerah rawan bencana dan konflik.	Jumlah anak dan remaja yang terlibat dalam perubahan sosial secara signifikan	-	25	50	75	100	125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak, kalurahan
	5.Mendukung remaja dalam menyusun solusi realistis melalui pendekatan	Program kreatifitas anak dan remaja dalam mitigasi bencana dan konflik.	Jumlah anak dan remaja yang mengikuti program kreatifitas mitigasi bencana.	-	25	50	75	100	125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP3AP2, KPAI, LSM, Forum Anak,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	yang inovatif.										
Perpektif kebencanaan belum diberikan kepada anak-anak baik secara formal maupun informal, <i>knowledge basic</i> bahwa Yogyakarta ada di <i>ring fire</i> belum di berikan menyeluruh kepada anak, guru dan/atau pendidik.	6.Pentingnya mitigasi bencana berperspektif anak.	Sosialisasi pentingnya "tas pengaman Dokumen" berisi dokumen penting dan berharga	Jumlah keluarga yang mengikuti sosialisasi		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Institusi Sekolah, Perguruan Tinggi, NGO, DP3AP2
		Destinasi wisata gratis dengan pemanfaatan hak dasar anak. Untuk mendukung tumbuh kembang anak, psikologi anak dengan teman sebaya.	jumlah wisata yang bisa diakses secara gratis.		1	1	1	1	1	Dinas pariwisata	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Institusi Sekolah, Perguruan Tinggi, NGO, DP3AP2

### E. Pekerja Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak

#### E.1 Anak Yang Bekerja

Masih ditemukannya pekerja anak	1. Mengeliminasi anak yang bekerja atau dipekerjakan dalam berbagai bentuk pekerjaan di lingkungan kabupaten/kota di DIY.	Advokasi dan <i>monitoring</i> pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja	Jumlah pekerja anak ditarik dari tempat kerja	-	5	10	15	18	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, DP3AP2, LSM, KPAI
		Pembentukan forum koordinasi pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan buruk anak	Jumlah forum koordinasi pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan buruk anak	-	4/tahun	4/tahun	4/tahun	4/tahun	4/tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, DP3AP2, LSM, KPAI

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Penarikan pekerja anak dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (BPTA)	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	-	5	10	15	18	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, DP3AP2, LSM, KPAI
		Deklarasi zona bebas pekerja anak	Jumlah kabupaten/kota melakukan deklarasi zona bebas pekerja anak	-	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, DP3AP2
		Pengintegrasian isu pekerja anak dalam kebijakan daerah Penegakan norma perlindungan pekerja anak di lingkungan perusahaan	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam IKU pemerintah daerah	-	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, DP3AP2, LSM, KPAI
	2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Program Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM di kabupaten/Kota di DIY	139	150	160	180	200	250	Dinas Sosial	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), DP3AP2, Pusat Pembelajaran Keluarga,
<b>E.2. Anak yang dilacurkan (AYLA)</b>											
Masih adanya anak-anak yang dilacurkan/AYLA (anak-anak yang bekerja sebagai pekerja seks	1.Pentingnya melakukan penarikan AYLA	Program Penarikan AYLA	Jumlah anak/remaja laki-laki dan perempuan yang ditarik dari dunia prostitusi.	-	0	0	0	0	0	DP3AP2	Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
komersial) Ada datanya DI DIY											Olahraga, POLDA, KPAI, NGO
	2. Optimalisasi deteksi dan pengawasan Aplikasi-aplikasi yang menjadi rujukan transaksi prostitusi Online, khususnya bagi anak.	Program penguatan <i>digital safety</i>	Tersedia sistem dan prosedur penguatan internet sehat untuk anak-anak dan remaja.	-	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Sosial, DP3AP2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, POLDA, KPAI, NGO
	3. Membangun sistem pemulihan psikososial dan integrasi sosial	Fasilitasi layanan psikososial bagi AYLA.	Ada layanan psikososial yang diakses secara gratis untuk anak-anak yang dilacurkan.	-	Ada	Ada dan mudah diakses	Dinas Sosial				
			Jumlah AYLA yang terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota.	-	0	0	0	0	0	Dinas Sosial	DP3AP2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Biro Bina Mental Spiritual, RDU, Polda, KPAI, NGO

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/ Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	4. Program pencegahan bagi anak-anak korban kekerasan seksual agar tidak terjerumus pada prostitusi baik online maupun offline	Program Pencegahan prostitusi Anak	Ada mekanisme pemantauan dan pemulihan psikososial bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Sosial	DP3AP2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Biro Bina Mental Spiritual, RDU, Polda, KPAI, NGO

## 6. Kelembagaan

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>A. Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak</b>											
Belum adanya perda RAD Layak Anak dan kebijakan yang mendukung pencapaian layak anak	1. Percepatan penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Adanya perda Perlindungan anak di DIY	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPRD	Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Bina Pembedayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, KPAID, Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Anak

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
			Adanya Peraturan Gubernur RAD layak anak di DIY	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2	Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Bina Pembedayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, KPAID, LPKA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Anak

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Harmonisasi peraturan/kebijakan yang mendukung percepatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di DIY	2. Harmonisasi peraturan/kebijakan perlindungan anak dari level pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, hingga kalurahan.	Kajian dan harmonisasi peraturan/kebijakan perlindungan anak di DIY	Adanya peraturan /kebijakan untuk pemenuhan hak anak yang telah tersinkronisasi dengan peraturan lain yang terkait	-	-	-	Ada	ada	ada	DP3AP2	Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, KPAID, LPKA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Anak

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	3. Pelibatan forum anak dalam perencanaan, implementasi, hingga proses monitoring dan evaluasi program-program perlindungan anak di kabupaten/kota di DIY.	Pelibatan forum anak dalam perencanaan, implementasi dan monitoring program	Jumlah forum anak yang terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan proses monitoring	25 forum anak	50 forum anak	75 forum anak	100 forum anak	125 forum anak	150 forum anak	DP3AP2	Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Bina Pembedayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, KPAID, LPKA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Anak

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>B. Pelembagaan kota/kabupaten layak anak</b>											
Belum optimalnya peran kelembagaan terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Penguatan peran kelembagaan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta	Fasilitasi peningkatan kapasitas dan peran aktif Gugus Tugas KLA di masing-masing Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang aktif		5	5	5	5	5	DP3AP2 Kabupaten/Kota	
		Optimalisasi fungsi dan kerja gugus tugas KLA	Adanya struktur, perencanaan, desain implementasi, monitoring dan evaluasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2 Kabupaten/Kota	
		Inisiasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Integrative (PKSAI) di tingkat Propinsi dan Kabupaten.	Desain dan implementasi Program		Ada dan terlaksana	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah					

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Fasilitasi penyusunan RAD Penyelenggaraan KLA di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY	Adanya dokumen RAD KLA di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	(DP3AP2) Kabupaten/Kota	Biro Pemerintahan, Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, KPAID, LPKA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Anak

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KLA di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY pada setiap tahunnya	Adanya dokumen evaluasi penyelenggaraan KLA di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2	Biro Pemerintahan, Biro Bina Pembedayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, KPAID, LPKA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Anak

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat	
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027			
Belum optimalnya updating data baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.	2. Pentingnya Pembaharuan data secara berkala dan berkesinambungan.	Update Data Gender dan Anak serta data perlindungan perempuan dan anak	Adanya publikasi data gender dan anak pada setiap tahunnya	--	Ada dan ter-update	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS,					
		Analisis dan kajian data terkait dengan isu gender dan anak	Adanya dokumen analisis dan kajian data terkait isu gender dan perlindungan anak	-	1 kajian	0	0	0	0	0	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, BPS, BAPPEDA, Biro Tata Pemerintahan
		Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak dan sistem data perlindungan perempuan dan anak	Adanya sistem data perempuan dan anak yang terpadu	-	Ada dan terlaksana	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, BPS, BAPPEDA, Biro Tata Pemerintahan					
		Pembinaan KLA di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY	Jumlah kegiatan pembinaan KLA yang dilaksanakan pada setiap tahunnya	-	2/tahun/Kabupaten/Kota	2/tahun/Kabupaten/Kota	2/tahun/Kabupaten/Kota	2/tahun/Kabupaten/Kota	2/tahun/Kabupaten/Kota	2/tahun/Kabupaten/Kota	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS
		Penyusunan Media Kampanye Terpadu PP, PA dan keluarga untuk diseminasi informasi gender dan anak	Adanya media kampanye terpadu PP, PA dan keluarga untuk diseminasi informasi gender dan anak	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Advokasi penyediaan serta pemanfaatan data gender dan anak di SKPD dan Kab/kota	Jumlah publikasi data gender dan anak di SKPD Kabupaten/Kota	-	60	60	60	60	60	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Data Gender dan Anak	Jumlah SDM pengelola data gender dan anak yang dilatih	-	12 kab/kota dan DIY	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Komunikasi dan Informatika				
Belum optimalnya peran keluarga dan Kelurahan/Kalurahan dalam mendorong pengarusutamaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di DIY.	3. Optimalisasi program kegiatan PUHA di tingkat kalurahan / kalurahan untuk pengarusutamaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di DIY	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kelurahan/Kalurahan ramah anak	Jumlah Kelurahan/Kalurahan ramah anak	78	72	72	72	72	72	DP3AP2 Kabupaten/Kota	DP3AP2, KPAID
		Penyusunan kriteria/standar rumah tangga ramah anak.	Tersedianya kriteria/standar rumah tangga ramah anak.		Ada dan terlaksana	Ada dan terlaksana	Ada dan terlaksana	Ada dan terlaksana		DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID
		Pembinaan dan pelatihan fasilitator terkait penyelenggaraan KLA di DIY	Jumlah gugus tugas KLA yang dilatih	5	5	5	5	5	5	5	DP3AP2

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait KLA	Adanya materi KIE KLA pada setiap tahunnya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Komunikasi dan Informatika
Belum optimalnya anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan anak di DIY	4. Peningkatan jumlah anggaran untuk 5 Kluster KHA.			10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
<b>C. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Dalam Pemenuhan Hak Dan Pelindungan Khusus Anak.</b>											
Belum optimalnya keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Pelindungan Khusus Anak	1. Optimalisasi dan penguatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Pelindungan Khusus Anak	Fasilitasi pembentukan APSAI di masing-masing Kabupaten/Kota	Adanya APSAI di masing-masing Kabupaten/Kota	-	5	5	5	5	5	DP3AP2, Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KPAID
		Fasilitasi dan koordinasi implementasi program pokok PKK ke dalam program dan kegiatan di Kelurahan/Kelurahan ramah anak	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan	-	4/tahun	4/tahun	4/tahun	4/tahun	4/tahun	TP PKK	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, DP3AP2 Kabupaten/Kota, KPAID
		Fasilitasi pembentukan jaringan media peduli anak	Adanya jaringan media peduli anak di masing-masing Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
		Fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan anak	Adanya tim pelaksana layanan kesejahteraan anak	90	100	110	120	130		DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID
		Pembinaan dan pelatihan tim pelaksana layanan kesejahteraan anak secara berkala	Jumlah pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan terhadap tim pelaksana kesejahteraan anak	-	2	4	6	8	10	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID
			SDM terlatih KHA	90	100	110	120	130	140	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID
		Fasilitasi TESAGA	Jumlah anak yang difasilitasi	757 Anak	800	375	850	900	1000	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID
Belum optimalnya investasi dari sector bisnis untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di DIY.	2. Pentingnya investasi perusahaan dan sektor bisnis dalam urusan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan anak melalui kemitraan pemerintah – swasta.	Kerjasama dengan sector bisnis untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di DIY.	Persentase meningkat nilai investasinya dari sector bisnis dalam pemenuhan KHA yang berkelanjutan		20 %	30 %	40 %	50 % 60 %		DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Forum CSR DIY,

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
	3. Pentingnya memperkuat kemitraan dengan sektor Masyarakat sipil demi menciptakan kesadaran dan membangun partisipasi anak dalam penggunaan dan perencanaan ruang publik dengan memperkuat platform yang berpusat pada anak, remaja, dan anak muda di tingkat kabupaten/kot a.	Kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil (NGO, CSO) untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di DIY	Adanya jumlah NGO dan nilai investasinya dalam pemenuhan KHA yang berkelanjutan	-	Ada dan terdokumentasi	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Forum CSR DIY, NGO				
	4. Membangun dan memperluas dialog serta kemitraan dengan banyak pihak untuk mendorong kemajuan bagi anak-anak, pemuda, dan remaja.	Koordinasi antar stakeholder (pemerintah, Sektor Bisnis, NGO, kampus, dan Komunitas)	Adanya keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	-	Ada dan terdokumentasi	DP3AP2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, KPAID, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Forum CSR DIY, NGO, Perguruan tinggi				

Permasalahan	Strategi	Kegiatan	Output/Sasaran kegiatan	Indikator /	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
				Baseline	2023	2024	2025	2026	2027		
Belum optimalnya upaya dunia usaha untuk berkontribusi dalam pemenuhan dan perlindungan anak di DIY	5. Pentingnya mendorong dunia usaha untuk Menyusun Kebijakan Perusahaan Yang Berperspektif Anak; Produk Yang Ditujukan Untuk Anak Harus Aman Bagi Anak; dan Berkontribusi Dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	Fasilitasi dunia usaha untuk Menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak.	Ada dokumen kebijakan mitra yang berperspektif Anak.	-	Ada dan terdokumentasi	DP3AP2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Forum CSR				

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X